



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



L K I P

2024



L a p o r a n
K i n e r j a
I n s t a n s i
P e m e r i n t a h

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 serta revisinya. Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Badung, 24 Januari 2025

Kepala Balai,



Iman Sukandar, MT.

NIP. 19710418 199803 1 011





RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019- 2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Dalam mendukung visi Presiden RI, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebagai salah satu unit kerja Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1);
2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2);
3. KP – Konektivitas Laut (PP 2);
4. KP – Konektivitas Udara (PP 2);
5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan
6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024, yang telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran





dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali masuk kategori baik. Hal tersebut terlihat dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang telah ditetapkan telah mencapai 100% di Tahun 2024. Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan rata-rata nilainya 100% dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKK} < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan jalan terealisasi sebesar 100% dari target 100% (Target 100%);
2. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebanyak 1 dari target 1 lokasi (Target 1);
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebanyak 8 dari target 8 Lokasi (Target 8);
4. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A terealisasi sebesar 85 % dari target 85% (Target 85%);
5. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 75% % dari target 75% (Target 75 %);
6. Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal terealisasi 100% dari target 100% (Target 100%);
7. Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 5% dari target 5 % (Target 5%);
8. Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan teralisasi sebanyak 8 dari target 8 lokasi (Target 8);
9. Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebanyak 200 orang dari target 200 Orang (Target 200 Orang);
10. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor teralisasi sebesar 85% dari target 85% (Target 85%);
11. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebanyak 100 dari target 100 (Target 100);
12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 95 dari target 95 (Target 95).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaru dan terkini.





Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I Pendahuluan	13
I.1 Latar Belakang	13
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	13
I.3 Bagan Struktur Organisasi	31
I.4. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Balai, Seksi - Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan	32
I.5. Sumber Daya Manusia	35
I.6. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	35
I.7. Sistematika Laporan	37
BAB II Uraian Singkat Perencanaan Strategis	44
II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	44
II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	45
II.1.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	48
II.1.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I dan II Tahun 2024	50
BAB III Akuntabilitas Kinerja	56
III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	56
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja	56
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	62
IKK 1.3. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	68
IKK1.6Jumlah Pelabuhan SDP yan44g Beroperasi.....	73
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.....	80
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.....	86
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.....	92
IKK 3.2. Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	97
<i>IKK 3.3. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.....</i>	102
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	108
IKK 3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.....	113
IKK 5.1 <i>Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.</i>	119





IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	126
BAB III REALISASI ANGGARAN.....	132
III. 1. REALISASI ANGGARAN.....	132
Alokasi Anggaran Tahun 2024.....	132
III.3.1.1. Pagu Anggaran.....	132
III.3.1.2. Refocussing Anggaran Tahun 2024.....	136
III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2024.....	142
Realisasi Anggaran.....	144
III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	144
III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	146
III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	147
III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja.....	149
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	151
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	153
Hambatan dan Kendala.....	28
IV. Penutup	29
IV.1 Ringkasan Capaian.....	29
IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	30





DAFTAR TABEL

Tabel II.	1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024	Bab II-15
Tabel II.	2 Perjanjian Kinerja Awal Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024	Bab II-18
Tabel II.	3 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024.....	Bab II-20
Tabel II.	4 Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024.....	Bab II-21
Tabel III.	1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024.....	Bab II-28
Tabel III.	2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024.....	Bab III-33
Tabel III.	2 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-34
Tabel III.	4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi.....	Bab III-45
Tabel III.	4 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-47
Tabel III.	5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Jumlah Terminal Pelabuhan SDP yang beroperasi.....	Bab III-52
Tabel III.	5 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-53
Tabel III.	6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.....	Bab III-58
Tabel III.	6 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-59





Tabel III. 7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.....	Bab III-63
Tabel III. 7 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-65
Tabel III. 8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.....	Bab III-68
Tabel III. 8 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-70
Tabel III. 9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor(UPPKB).....	Bab III-74
Tabel III. 9 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-75
Tabel III. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan.....	Bab III-79
Tabel III. 10 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-80
Tabel III. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan.....	Bab III-79
Tabel III. 10 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-80
Tabel III. 11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.....	Bab III-84
Tabel III. 11 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-86
Tabel III. 12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	Bab III-91
Tabel III. 12 Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-92
Tabel III. 13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	Bab III-96





Tabel III. 13	Benchmark Nasional/Internasional.....	Bab III-98
Tabel III. 14	Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024	Bab III-98
Tabel III. 15	Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024	Bab III-98
Tabel III. 16	Rincian per Sumber Dana Pagu Per Triwulan IV Tahun 2024	Bab III-99
Tabel III. 17	Rincian per Jenis Belanja Pagu Per Triwulan IV Tahun 2024.....	Bab III-99
Tabel III. 18	Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2024.....	Bab III-102
Tabel III. 19	Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2024.....	Bab III-103
Tabel III. 20	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2024.....	Bab III-104
Tabel III. 21	Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024.....	Bab III-105
Tabel III. 22	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 - Tahun 2024.....	Bab III-106
Tabel III. 23	Kegiatan Program yang ada dalam DIPA.....	Bab III-108
Tabel III. 24	Realisasi anggaran per Jenis Belanja Tahun	Bab III-109
Tabel III. 25	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan IV 2024.....	Bab III-110
Tabel III. 26	Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	Bab III-112
Tabel III. 27	Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024.....	Bab III-112
Tabel III. 28	Rincian sisa Anggaran Tahun 2024.....	Bab III-113
Tabel III. 29	Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....	Bab III-114





Daftar Gambar

- Gambar I. 1 Gambar Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Bab I-3
- Gambar III. 1 Gambar Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024..... Bab III-30
- Gambar III. 2 Perbandingan Realisasi kinerja Pelaksanaan keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-34
- Gambar III. 3 Gambar Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024..... Bab III-42
- Gambar III. 4 Perbandingan Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-46
- Gambar III. 7 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024.....Bab III-48
- Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-53
- Gambar III. 9 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.....Bab III-55
- Gambar III. 10 Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-58
- Gambar III. 11 Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDPBab III-61
- Gambar III. 12 Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di SDP dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-64





- Gambar III. 13 Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024.....Bab III-66
- Gambar III. 14 Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-69
- Gambar III. 15 Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2023.....Bab III-71
- Gambar III. 16 Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-75
- Gambar III. 15 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan.....Bab III-71
- Gambar III. 16 Perbandingan Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-75
- Gambar III. 17 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024.....Bab III-76
- Gambar III. 18 Perbandingan Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-80
- Gambar III. 19 Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024.....Bab III-82
- Gambar III. 20 Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-85





- Gambar III. 21 Capaian Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024.....Bab III-87
- Gambar III. 22 Perbandingan Realisasi kinerja Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-92
- Gambar III. 23 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II BaliBab III-93
- Gambar III. 24 Perbandingan Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024..... Bab III-97
- Gambar III. 25 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – Tahun 2024.....Bab III-106
- Gambar III. 26 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2023.....Bab III-111





BAB I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat dituntut menjadi unit pelaksana yang melakukan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta menyelenggarakan manajemen perencanaan, program, anggaran, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan di satuan pelayanan masing – masing hingga evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Sebagai salah satu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, *Transparan*, *Akuntable*, *Efektif* dan *Efisien* sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dan Pelabuhan Sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan Sungai, danau dan penyeberangan. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

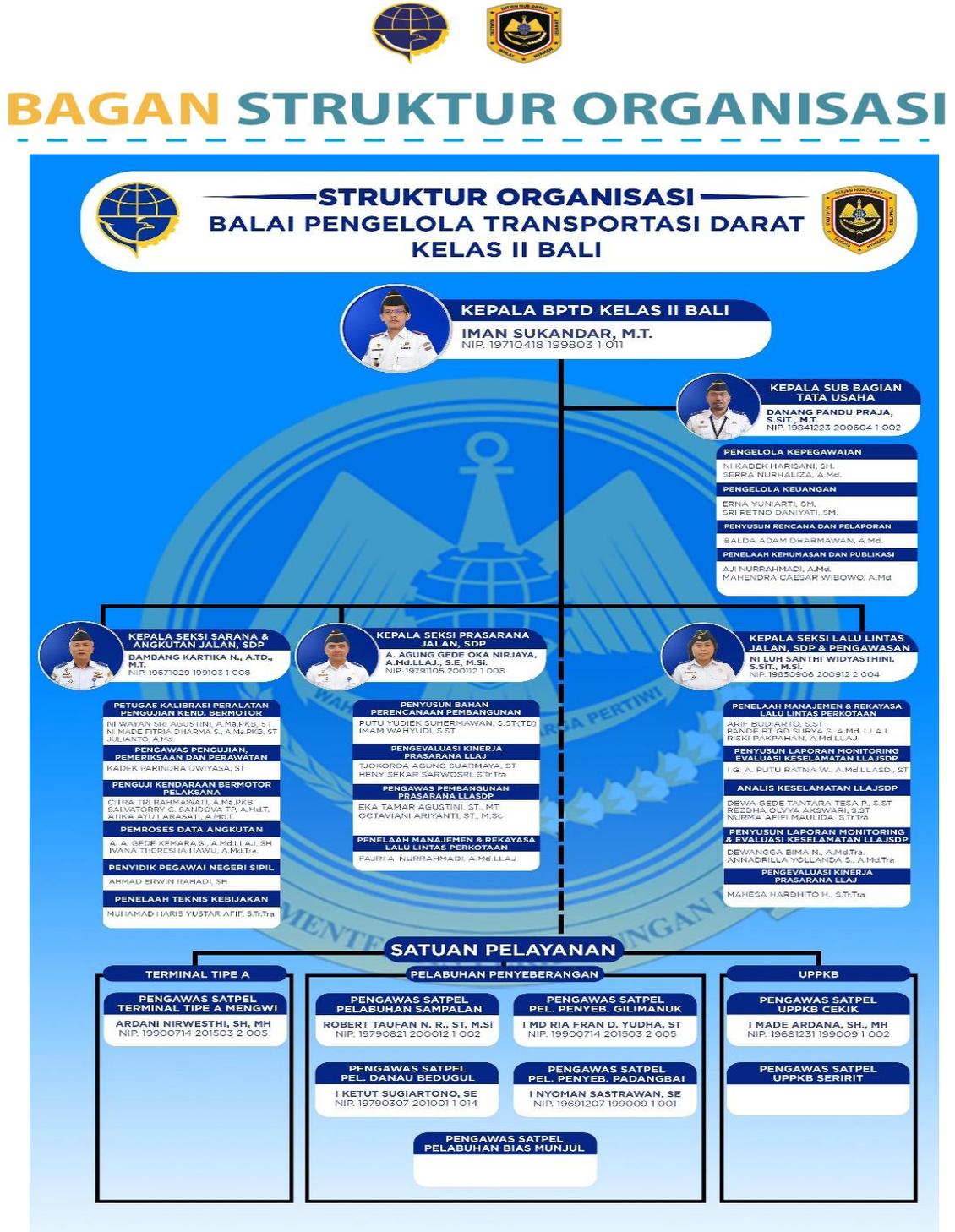
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan Sungai, danau, penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran Sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, Sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan Masyarakat;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.





I.3 Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah sebagai berikut :



Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali





I.4. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Balai, Seksi - Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan

A. Tugas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Adapun tugas Kepala BPTD Kelas II Bali sebagai berikut :

1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
3. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan;
4. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional;
5. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
6. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
7. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
8. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
9. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
10. Melaksanakan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
11. Mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.





B. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTD Kelas II Bali

Adapun tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana, program, anggaran dan laporan evaluasi kinerja;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Melaksanakan penyusunan pelaporan Sistem Akuntansi Instansi;
4. Menyusun urusan Sumber Daya Manusia, kearsipan, dokumentasi,;
5. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
6. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan Masyarakat, dan infomasi publik;
7. Menyusun bahan evaluasi dan laporan.

C. Tugas Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali

Adapun tugas Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Melaksanakan bahan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum;
2. Melaksanakan bahan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
3. Menyusun bahan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
4. Melaksanakan bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Tugas Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali

Adapun tugas Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor;
2. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
3. Melaksanakan analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan;
4. Melaksanakan bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.





E. Tugas Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan BPTD Kelas II Bali

Adapun tugas Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau;
2. Menyusun Bahan sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau;
3. Melakukan pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri;
4. Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. Menyelenggarakan pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan;
6. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan;
7. Melaksanakan pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau;
8. Melaksanakan kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
9. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.





I.5. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali memiliki 275 Pegawai (ASN dan PPNPN) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali : 77
2. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mengwi : 78
3. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk : 35
4. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Padangbai : 22
5. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Sampalan : 19
6. Satuan Pelayanan Pelabuhan Danau Bedugul : 3
7. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Mentigi : 2
8. Satuan Pelayanan UPPKB Cekik : 39

I.6. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.6.1 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;





- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.6.2. Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2024, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam rangka pelaksanaan tupoksi agar dapat dilaksanakan dengan baik.

I.6.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat. Sesuai dengan Revisi POK ke-17 Pagu Anggaran BPTD Kelas II Bali yaitu sebesar Rp. 122.472.888.000.

I.6.4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Culture set* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta;
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB;
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.6.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024 adalah:





1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Indikator Kinerja Kegiatan;
4. Pengukuran Kinerja;
5. Evaluasi Kinerja.

I.7. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024**
- II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - **Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I dan II Tahun 2024**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - A. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**
 - **Uraian Sasaran Kegiatan**
 - A.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan**
 - A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024
- A.1.7. Benchmark Nasional/Internasional

A.2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024
- A.2.7. Benchmark Nasional/Internasional

A.3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

- A.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- A.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024





A.3.7. Benchmark Nasional/Internasional

B. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

B.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

B.1.1. Definisi Indikator Kinerja

B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024

B.1.7. Benchmark Nasional/Internasional

B.2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

B.2.1. Definisi Indikator Kinerja

B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024

B.2.7. Benchmark Nasional/Internasional





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

C. SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

C.1. IKK 3.1 Persentase Perengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024
- C.1.7. Benchmark Nasional/Internasional

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Pehubungan Darat

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024
- C.2.7. Benchmark Nasional/Internasional

C.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- C.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024
- C.3.7. Benchmark Nasional/Internasional

C.4. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- C.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- C.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024
- C.4.7. Benchmark Nasional/Internasional

C.5. IKK 3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- C.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

C.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

C.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024

C.5.7. Benchmark Nasional/Internasional

D. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1.1. Definisi Indikator Kinerja

D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

D.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

D.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024

D.1.7. Benchmark Nasional/Internasional

E. SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

E.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

E.1.1. Definisi Indikator Kinerja

E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

E.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

E.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 – 2024

E.1.7. Benchmark Nasional/Internasional

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 - 2024

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I dan II Tahun 2024;
5. Revisi Rencana Aksi I dan II Tahun 2024;
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
7. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024;
8. Lain – lain yang dianggap perlu.





BAB II Uraian Singkat Perencanaan Strategis

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini (**Lampiran 1**) :

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 - 2024 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%
		2	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi
		3	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi
2.	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN	4	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	TRANSPORTASI DARAT	5	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%
3.	MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	6	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%
		7	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%
		8	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi
		9	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang
		10	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%
4.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	11	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai
5.	MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan, satuan dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024. Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali,





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan awal (RKT) berisi 5 (lima) Sasaran Kegiatan, 12 (dua belas) indikator kegiatan dan targetnya masing-masing. **(Lampiran 2)**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1
		1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8
2.	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85
		2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75
3.	MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lokasi	8
		3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	300
		3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85
4.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5.	MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95





II.1.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran diawal adalah Rp. 113.027.469.000,- adalah sebagai berikut (**Lampiran 3**) :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1
		1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8
2.	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85
		2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
3.	MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5
		3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lokasi	8
		3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	150
		3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85
4.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5.	MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN	1	Tingkat Penyelenggaraan	Nilai	95





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp 29.895.648.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp 25.549.904.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp 29.802.446.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp 4.135.934.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 120.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 7.352.406.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp 16.171.131.000
Total		Rp 113.027.469.000

II.1.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I dan II Tahun 2024

Sebagai penyesuaian karena adanya perubahan pimpinan yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan revisi anggaran Tahun Anggaran 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali melakukan revisi terhadap perjanjian kerja awal.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Perubahan tersebut terlihat pada penyesuaian jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 118,725,293,000,- pada Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sedangkan jumlah pagu kegiatan pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 123.272.888.000,-. **(Lampiran 4 dan Lampiran 5)**

Tabel II.3 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTRAMODA TRANSPORTASI	1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1
		1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8
2.	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85
		2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75
3.	MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		3.3	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	8
		3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	150
		3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85
4.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5.	MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp 28.290.115.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp 25.549.904.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp 29.754.942.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp 4.135.934.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 120.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 7.352.406.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp 23.521.992.000
Total		Rp 118.725.293.000

Tabel II.4 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1
		1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8
2.	MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85
		2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75
3.	MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	200
		3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85
4.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5.	MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	95

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp 26.194.528.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp 26.781.404.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp 31.246.293.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp 4.135.934.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 120.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 7.352.406.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp 27.442.323.000
	Total	Rp 123.272.888.000



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Pada revisi I dan II Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang targetnya mengalami perubahan yaitu **Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan**, dimana pada perjanjian Kinerja Revisi I ditargetkan sebanyak 150 orang dan pada Revisi Perjanjian Kinerja II berubah menjadi 200 orang.





BAB III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:





Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020





Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024





Tabel III. 2 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				75,34%			83,48%			91,66%			100%
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	26,02	26,02 %	100	50,46	50,46%	100	75,5	75,5%	100	100	100%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1	1	100 %	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8	8	100 %	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				102%			104,5%			104,5%			100%
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85	90	106 %	85	90	106%	85	90	106%	85	85	100%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75	74	98 %	75	77	103%	75	77	103%	75	75	100%
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				79,68%			133,2%			104,8%			
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	91,46	91,46 %	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5	2,9	142%	5	12,7	54%	5	9,4	12%	5	5	100%
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZosS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Lokasi	8	8	100 %	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	150	0	0 %	150	200	133%	150	200	133%	200	200	100%
IKK 3.7	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85	56	65 %	85	67	79%	85	78	91%	85	85	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				100%			100%			100%			100%





IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	100 %	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				100%			100%			100%			100%
IKK 1	Tingkat Pelayanan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95	95	100 %	95	95	100%	95	95	100%	95	95	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran kegiatan					91,40%			104,2%			100%			100%

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					85,70%			110,27%			100,6%			100%
--	--	--	--	--	---------------	--	--	----------------	--	--	---------------	--	--	-------------

Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)					7			10			10			12
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					5			2			2			0

*Keterangan : T = Target
R = Realisasi
C = Capaian





Selama tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 12 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pada Provinsi Bali. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam Indikator Kinerja Kegiatan membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100
2.	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1	1
3.	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8	8

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- IKK 1.1 : Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan;**
- IKK 1.3 : Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi;**
- IKK 1.6 : Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.**

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a. Definisi Indikator Kinerja

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan transportasi yang menghubungkan rute-rute yang belum dimasuki oleh angkutan komersil, Balai Pengelola



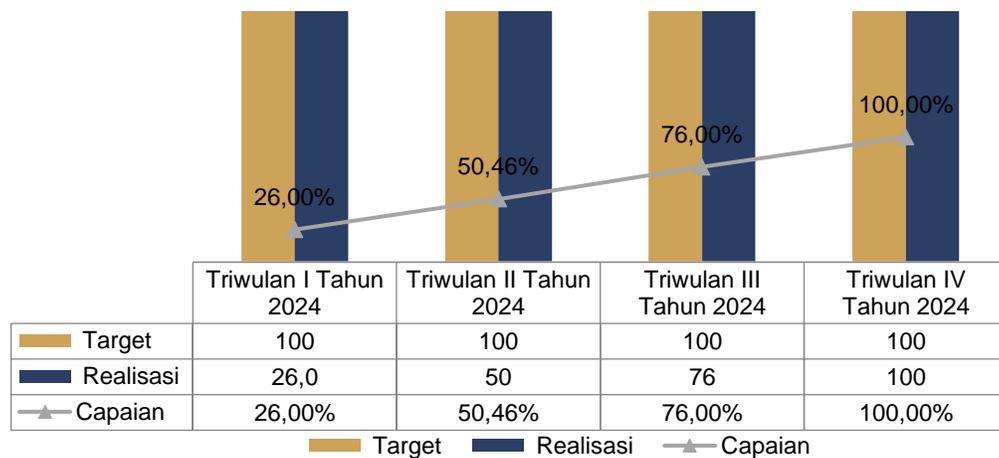


Transportasi Darat Kelas II Bali telah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melalui subsidi angkutan perintis melalui Perum DAMRI untuk di Provinsi Bali yaitu 8 trayek subsidi operasional angkutan jalan reguler di Provinsi Bali. Persentase pelaksanaan Keperintisan angkutan jalan dihitung dengan perbandingan pelaksanaan pada tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan.

$$= \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Capaian Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2024 sebesar 100. Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.13**. Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.



Gambar III 1 Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550-DRJD Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9842 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada





Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2023. **(Lampiran 6)**

- **Kronologi Target**

Pada tahun 2024 untuk target Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100 dikarenakan belum adanya peningkatan pada angkutan perintis di BPTD Kelas II Bali.

- **Capaian Kinerja**

Dalam upaya mewujudkan pencapaian jumlah Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan di Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal dengan melakukan monitoring secara langsung dan melibatkan supervisi eksternal dalam pelaksanaannya. Target sejumlah 100% pada Tahun 2024 sampai dengan akhir periode pelaksanaan telah tercapai. Dari analisa pelaksanaannya, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Dalam memperoleh jumlah Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga capaian kinerja persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Keperintisan Angkutan Jalan Provinsi Bali} &= \frac{15756}{15756} \times 100 = 100 \% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% = 100 \% \end{aligned}$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan antara lain:

1. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
2. Angkutan keperintisan menjadi salah satu transportasi yang murah;





3. Komitmen antara BPTD Bali dengan Pemerintah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun faktor potensi kegagalan terhadap indikator persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan antara lain:

1. Kendala dalam mendapatkan BBM bersubsidi karena di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi;
2. Terjadi kenaikan BBM Non-Subsidi sehingga harus dilakukan penyesuaian beberapa komponen agar pelayanan tetap berjalan;
3. Kurangnya informasi atau pengumuman yang tersampaikan ke masyarakat daerah terkait angkutan perintis

- **Realisasi Anggaran**

Anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di tahun 2024 dengan total 8 (delapan) trayek mencapai Rp. 7.942.776.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu), pada tanggal 23 Januari 2024 terdapat *Automatic Adjustment (AA)* menjadi 5 (lima) trayek dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 6.496.016.227 atau mencapai 99,97% dan tidak terdapat lagi usulan dari pemerintah daerah terkait 3 (tiga) trayek yang terkena *Automatic Adjustment (AA)*.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Melakukan studi secara matang akan kebutuhan dan rasio keperintisan angkutan jalan untuk wilayah Provinsi Bali;
2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keperintisan angkutan jalan;

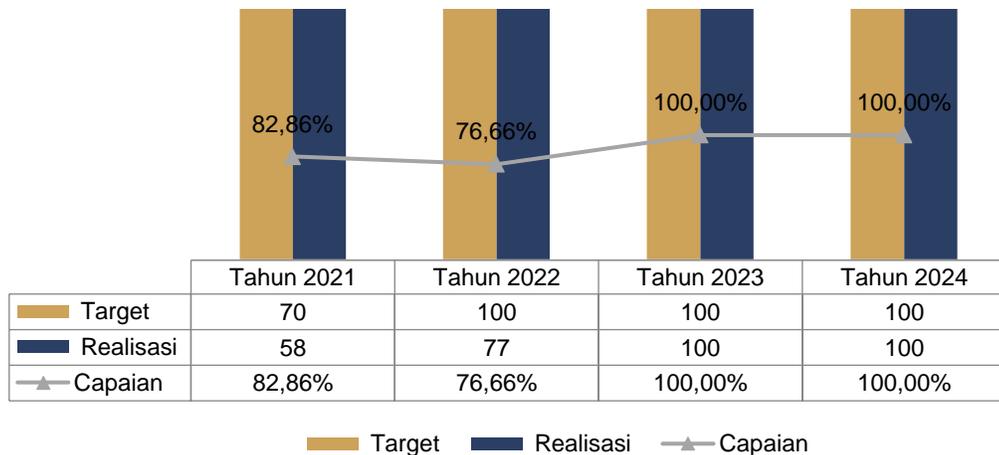




3. Terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 sebesar 100 atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Bisa dibandingkan dengan target pada tahun 2021-2023 untuk capaian pelaksanaan kegiatan keperintisan angkutan jalan. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel III. 2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

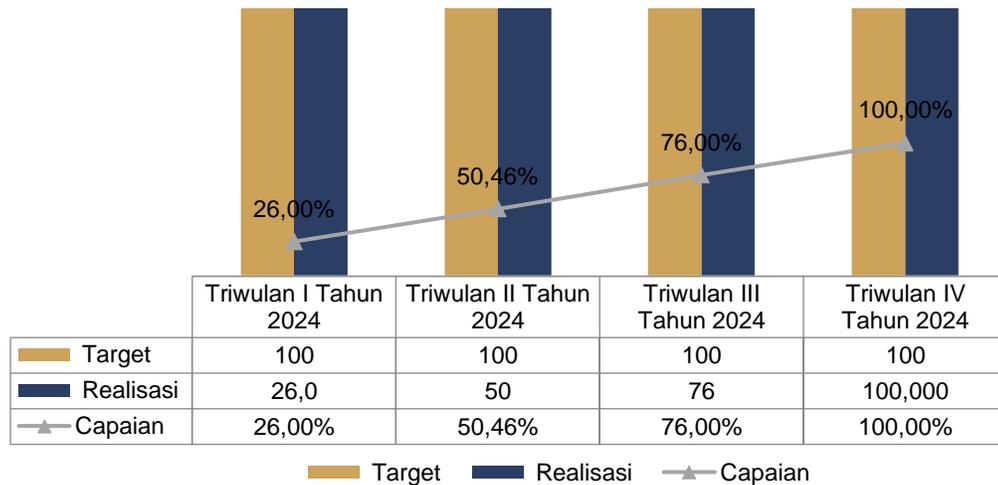
f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020-2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 2**. Perbandingan Realisasi





pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.



Gambar III 2 Perbandingan Realisasi Kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian dan realisasi kinerja Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada tahun tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Capaian Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,80%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Bali memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di BPTD Kelas II Bali sudah baik.





IKK 1.3. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi

a. Definisi Indikator Kinerja

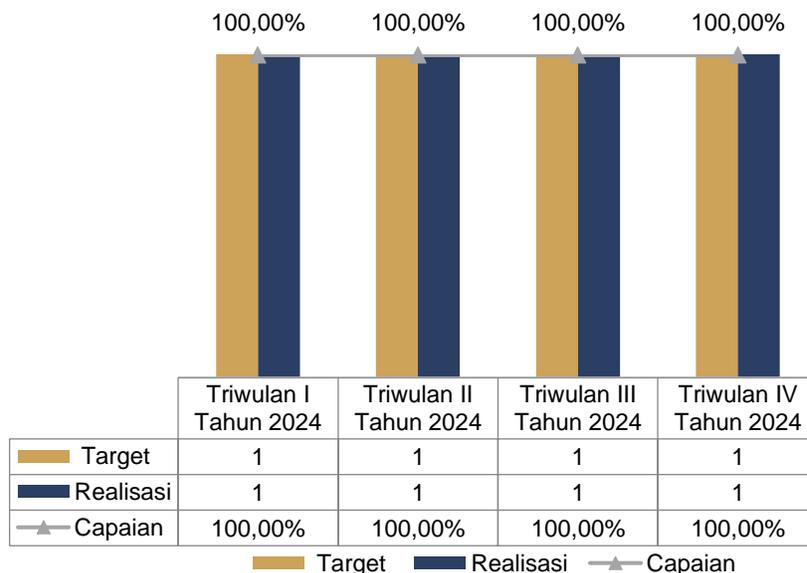
Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah riil Terminal Tipe-A di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Untuk di Provinsi Bali terdapat 1 (satu) Terminal yaitu Terminal Tipe-A Mengwi. Sedangkan untuk terminal barang khusus untuk saat ini belum tersedia.

Cara Menghitung :

Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Capaian Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2024 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II. 9**. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024.



Gambar III 3 Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi





c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No 12 Tahun 2024 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A yang beroperasi pada tahun 2024 yaitu di Terminal tipe-A Mengwi dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A Mengwi. **(Lampiran 7)**

• Kronologi Target

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 1 yang Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dikarenakan belum adanya pembangunan untuk Terminal Tipe-A baru.

• Capaian Kinerja

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebesar 1 maka jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi di Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan baik sarana maupun prasarana yang dilakukan secara bertahap.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$





- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi antara lain :

1. Peningkatan SPM terminal untuk meningkatkan minat masyarakat ke terminal;
2. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
3. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
4. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indicator jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi antara lain :

1. Masih banyak penumpang yang naik di luar terminal;
2. Masih banyak bus yang menunggu di luar terminal;
3. Masih banyak kendaraan angkutan penumpang tidak berizin yang mengangkut penumpang di luar terminal;
4. Minimnya fasilitas angkutan *feeder*;
5. Minimnya operasional anggaran pemeliharaan terminal.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 Operasional Terminal Penumpang Tipe A senilai Rp. 6.749.915.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 6.731.378.604 atau mencapai 99,73%.

d.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang beberapa langkah yang akan ditempuh, antara lain:

1. Revitalisasi seluruh Terminal Tipe-A di wilayah Provinsi Bali;
2. Melaksanakan monitoring pada Terminal Tipe-A secara berkala;

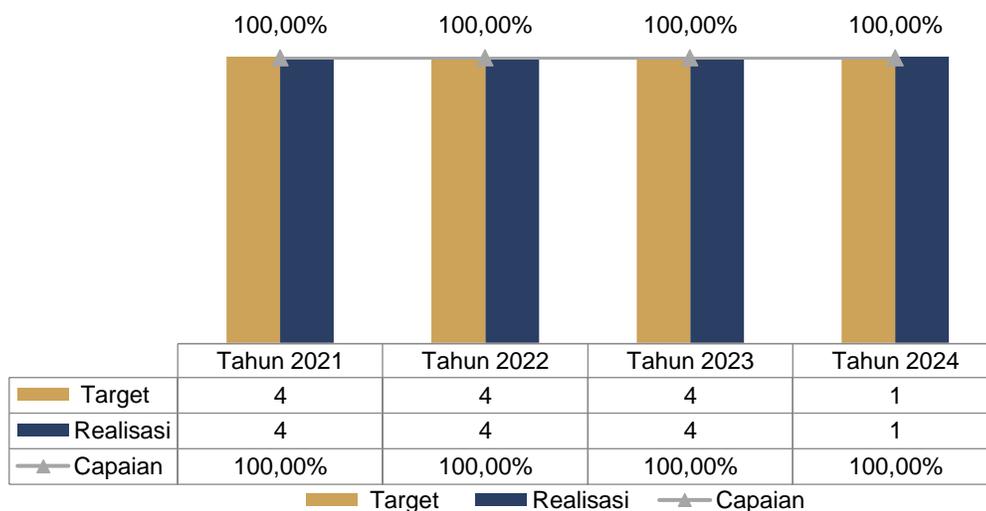




3. Meningkatkan seluruh aspek pelayanan pada Terminal Tipe-A;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh operator Bus AKAP ataupun AKDP agar melakukan aktifitas pemuatan dan penurunan penumpang hanya melalui Terminal.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 sebesar 1 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel III. 3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023, dan Tahun 2024

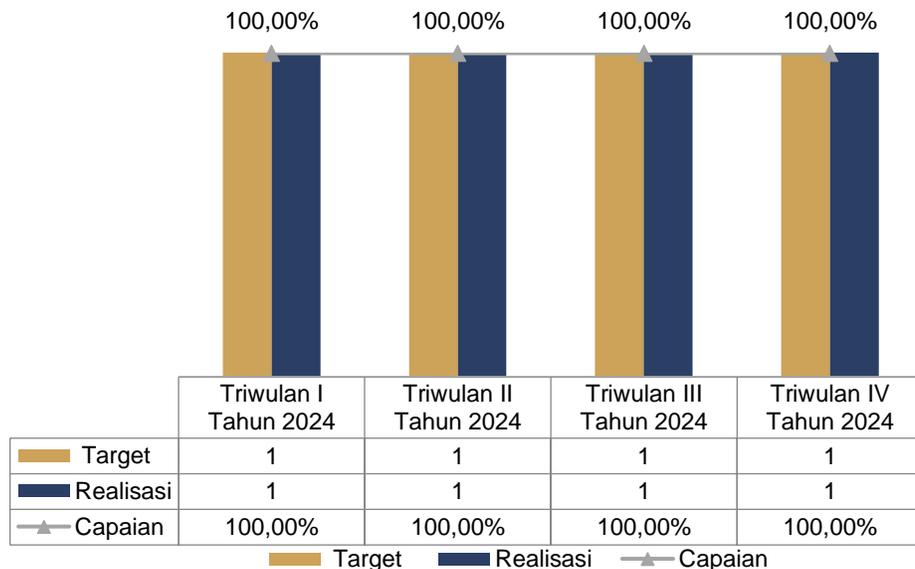
f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020-2024 sebesar 1 maka capaian kinerja





mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 6**. Perbandingan Realisasi Kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.



Gambar III 4 Perbandingan Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%





Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi BPTD Kelas II Bali memiliki capaian yang sama dengan rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi di BPTD Kelas II Bali sudah baik.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi adalah jumlah riil Pelabuhan SDP di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Untuk di Provinsi Bali terdapat 8 (delapan) Pelabuhan SDP yaitu : Pelabuhan Penyeberangan Sampalan, Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, dan Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Mentigi, Pelabuhan Danau Desa Trunyan, Pelabuhan Danau Batur Kedisan, Pelabuhan Danau Bedugul Tabanan.

Catatan : Pengelolaan yang dimaksud adalah : Pengambil alihan fungsi Kesyahbandaran dan keselamatan Pelabuhan Penyeberangan, pengaturan jadwal kapal, pengawasan manifest dan lashing.

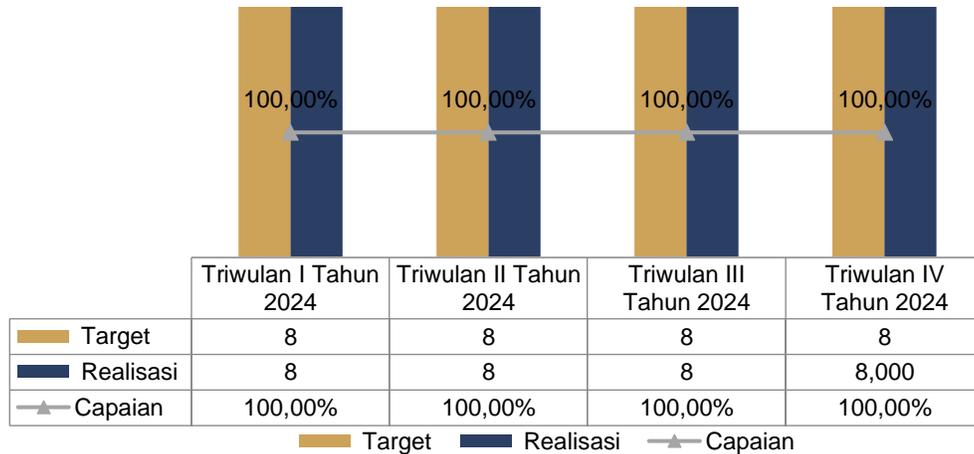
Cara menghitung :

Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Capaian Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2024 sebesar 8. Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.11**. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.





Gambar II 5 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No.12 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja BPTD, maka ditetapkan untuk Pelabuhan Penyeberangan dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Jumah pelabuhan SDP yang beroperasi pada tahun 2024 di Provinsi Bali terdapat 8 pelabuhan antara lain sebagai berikut :

1. Pelabuhan Penyeberangan Sampalan
2. Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul
3. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk
4. Pelabuhan Penyeberangan Padangbai
5. Pelabuhan Penyeberangan Mentigi
6. Pelabuhan Danau Desa Trunyan
7. Pelabuhan Danau Batur Kedisan
8. Pelabuhan Danau Bedugul Tabanan

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi di Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk





melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Kesyahbandaran dan fungsi keselamatan penyeberangan yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di seluruh pelabuhan SDP di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 8)**

- **Kronologi Target**

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 8 yang Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dikarenakan pelabuhan yang telah beroperasi di BPTD Kelas II Bali hanya 8 Pelabuhan.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebesar 8 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 8 atau sama dengan 100%.

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi di Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Kesyahbandaran dan fungsi keselamatan penyeberangan yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di seluruh pelabuhan SDP di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.





• Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

• Faktor Potensi Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain :

1. Masih Kurangnya SDM yang berkompeten (*Marine Inspector* dan Syahbandar);
2. Keadaan Alam seperti pasang surut air laut yang sering terjadi;
3. Perlunya peningkatan fasilitas kantor;
4. Minimnya operasional anggaran pemeliharaan terminal;
5. Kepemilikan aset pelabuhan yang masih berada di pihak operator;
6. Minimnya anggaran belanja modal untuk perkantoran.

• Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 Operasional Pelabuhan SDP senilai Rp. 6.004.989.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 5.938.890.634 atau mencapai 98,90%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;

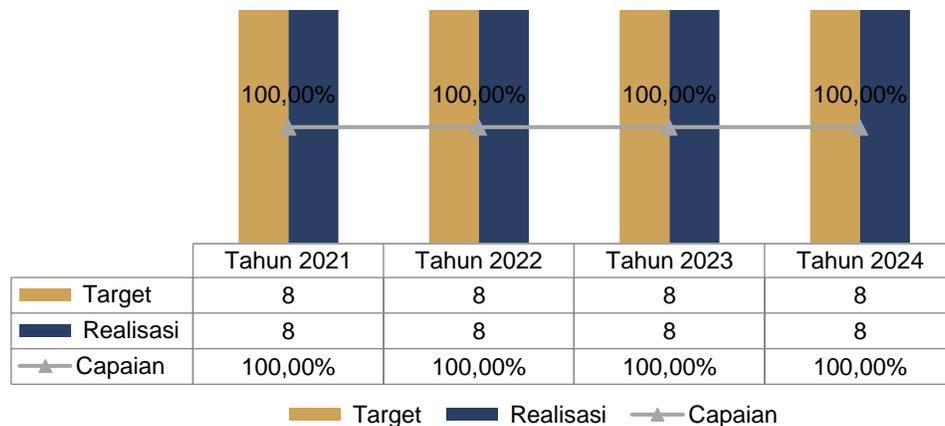




2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan:
 - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran;
 - b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penyeberangan;
 - c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Bimbingan Teknis Auditor ISPS Code;
 - e. Bimbingan Teknis Auditor ISM Code;
 - f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLASDP;
 - g. Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah di Bidang SDP.
3. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi Tahun 2024 sebesar 8 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 8. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



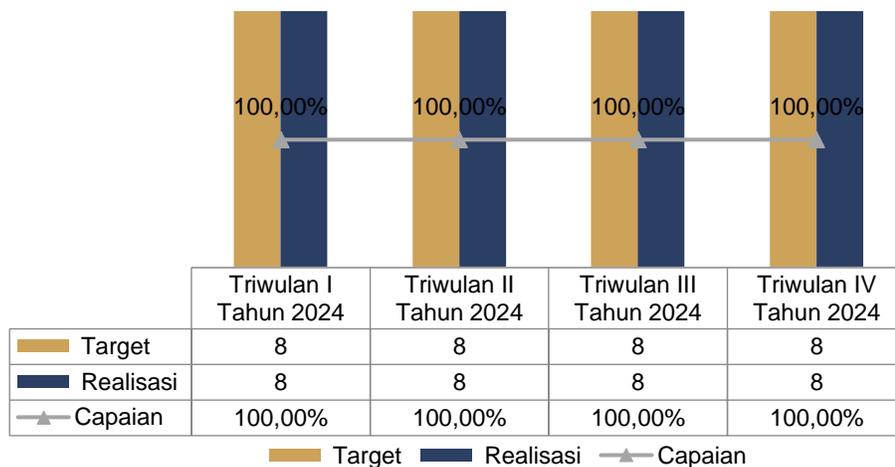
Tabel III. 4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024





f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi Tahun 2024 sebesar 8 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020-2024 sebesar 8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 6**. Perbandingan Realisasi Kinerja jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.



Gambar III. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja pada tahun tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan capaian Jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :





No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,30%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Bali memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di BPTD Kelas II Bali sudah baik

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pada Provinsi Bali. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam Indikator Kinerja Kegiatan membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.





Tabel II.4 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85	90,12%
2.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75	76%

Sumber : Data diolah oleh Seksi Prasarana JSDP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A
2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dihitung berdasarkan perbandingan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dengan keseluruhan jenis pelayanan di Terminal Tipe-A Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A adalah pelayanan standar yang diperoleh oleh pengguna jasa Terminal Tipe-A di pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Standar Pelayanan Minimum tersebut terkait sarana-prasarana pendukung yang ada di Terminal Tipe-A dan pelayanan petugas Terminal yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, seperti : keberadaan ruang tunggu yang nyaman dan memadai, ketersediaan fasilitas toilet yang bersih, fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas informasi bagi pengguna jasa dan pelaksanaan kegiatan operasional oleh petugas sesuai dengan aturan dan SOP yang telah ditetapkan

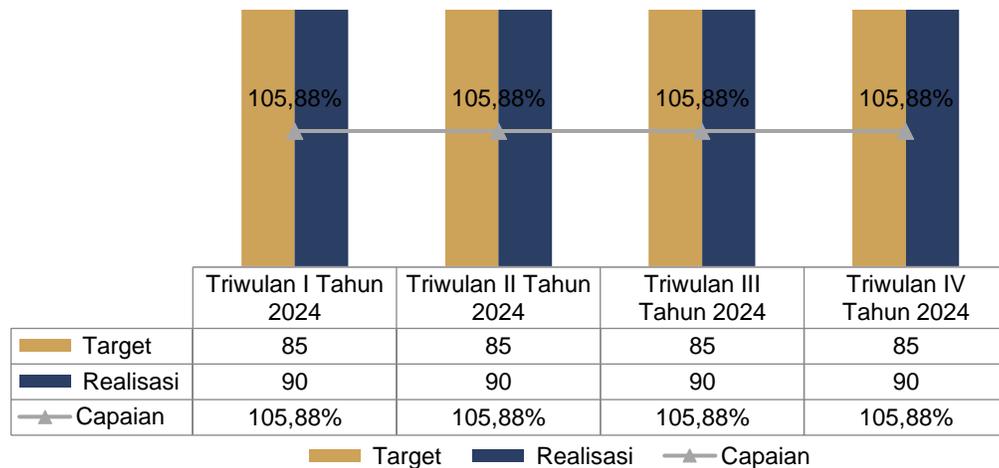




sebelumnya. Untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali membawahi 1 (satu) Terminal Tipe-A, yaitu : Terminal Tipe-A di Mengwi Kab. Badung Provinsi Bali.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 90% jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 106%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.1. Grafik Capaian IKK kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.



Gambar II. 6 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. **(Lampiran 9)**

• Kronologi Target

Pada tahun 2024 untuk IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di





Terminal Tipe-A memiliki target yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 85% dikarenakan belum adanya peningkatan terminal dan sesuai dengan atensi dari pimpinan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2024, Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebesar 105%, dikarenakan realisasi pada bulan November sebesar 90% yang didapatkan berdasarkan dari hasil survey dan analisis dari seksi terkait.

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A= $90/85 = 105\%$, dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{85} \times 100\% = 105\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. ketersediaan fasilitas utama dan penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Terselenggaranya pelayanan di terminal dari aspek, keamanan, kebersihan, ketertiban
3. Tersedianya petugas pelayanan yang cukup dalam memberikan pelayanan yg prima, di dalam terminal

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Masih perlunya dilakukan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai pada beberapa Terminal Tipe A;
2. Perlunya peningkatan SDM yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A;





3. Penyediaan adanya fasilitas khusus dan petugas khusus yang dapat melayani para kelompok rentan (Lansia dan Disabilitas).

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tercover pada kegiatan Operasional Terminal Tipe - A dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.6.749.915.000 dengan realisasi Rp 6.731.378.604 dengan nilai capaian di Tahun 2024 sebesar 99.73%.

- d. **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

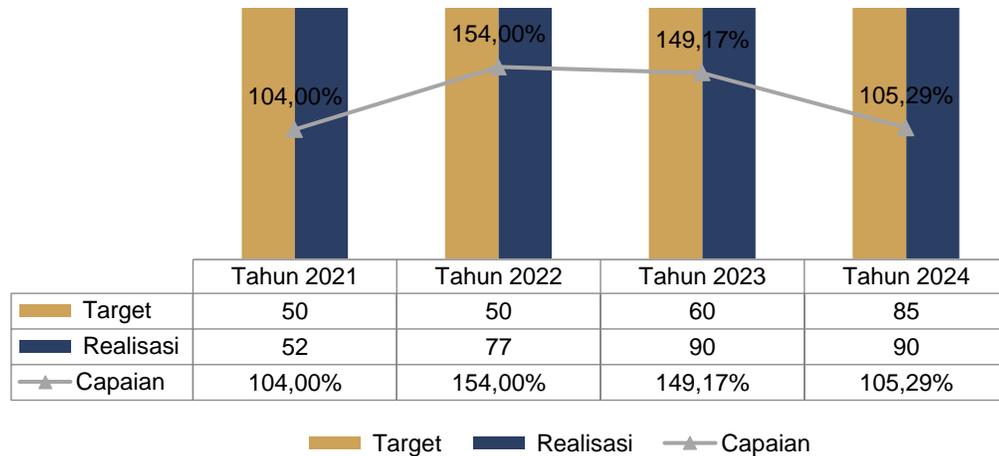
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan revitalisasi dan pembenahan pada seluruh terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
2. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, dengan peningkatan kompetensi dan SDM petugas Terminal melalui diklat atau bimtek;
3. Terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.

- e. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Realisasi kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2023 sebesar 90% atau 105% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



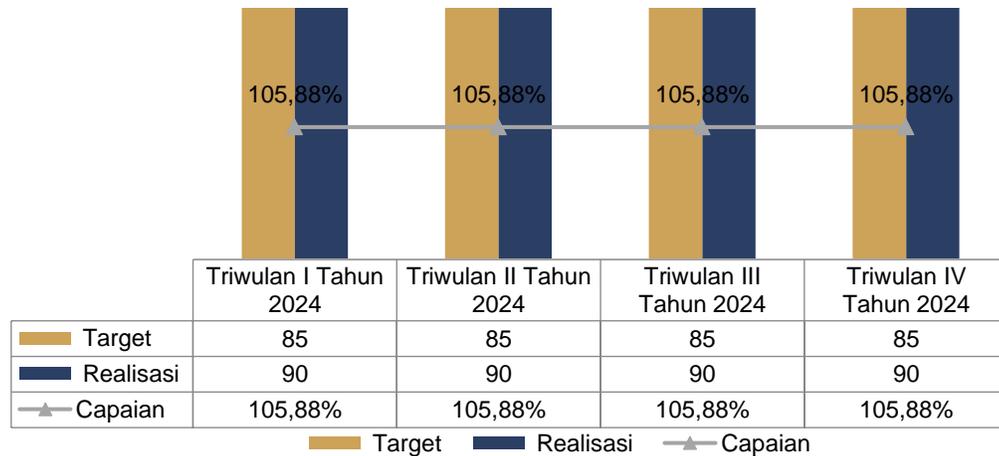


Tabel III. 5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020-2024 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 8**. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.





Gambar III 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja pada tahun tahun 2024 adalah 90%. Berikut perbandingan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	105%	97,33%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe-A BPTD





Kelas II Bali memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Bali sudah baik.

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a. Definisi Indikator Kinerja

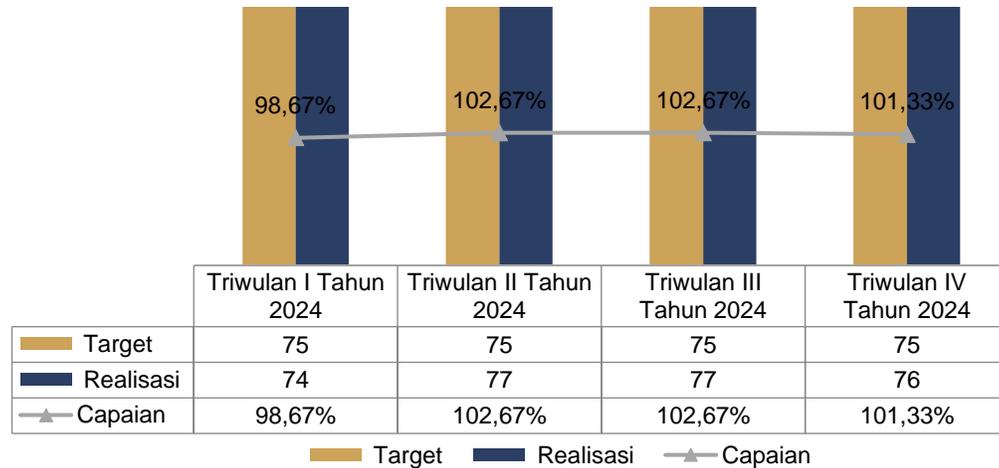
Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah penyediaan fasilitas utama dan penunjang yang wajib tersedia dalam konteks pelayanan jasa. Pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Sesuai dengan revisi Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, pelaksanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP ditargetkan sebesar 75% dan hal ini sudah terlaksana pada Tahun 2024 sebesar 76%. Untuk dapat menghitung capaian kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Pelabuhan ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 76% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 75% maka capaian kinerja mencapai 101%. Sesuai dengan rencana awal perjanjian kinerja, kegiatan ini sepenuhnya terlaksana pada Triwulan I dan III Tahun 2024. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.5. Grafik Capaian IKK Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.





Gambar II 8 Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. **(Lampiran 10)**

- **Kronologi Target**

Berdasarkan target pada perjanjian kinerja 75% untuk kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024, target ini ditetapkan berdasarkan target dari tahun-tahun sebelumnya dan juga arahan dari pimpinan.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan data di atas, Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali telah tercapai sebesar 101%, dikarenakan realisasi pada bulan November





sebesar 76% yang didapatkan berdasarkan dari hasil survey dan analisis dari seksi terkait, dimana hal ini terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{76\%}{75\%} \times 100\% \\ &= 101\% \end{aligned}$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun beberapa faktor keberhasilan tercapainya indikator persentase pelaksanaan standar pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP antara lain:

1. ketersediaan fasilitas yg baik di pelabuhan
2. ketersediaan sdm yg berkompeten cukup di bidang llasdp
3. terpeliharanya fasilitas di pelabuhan sdp

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa faktor kegagalan terhadap indikator persentase pelaksanaan standar pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP antara lain:

1. fasilitas prasarana pelabuhan yg masih kurang memadai
2. minimnya jumlah sdm dan kompetensi yg dimiliki berkompeten
3. minim anggaran untuk pemeliharaan

- **Anggaran**

Adapun anggaran terkait kegiatan pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2024 menggunakan pagu anggaran Operasional Pelabuhan SDP sebesar Rp. 6.004.989.000 dengan realisasi di Tahun 2024 sebesar Rp. 5.938.890.634 atau mencapai 98,90%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

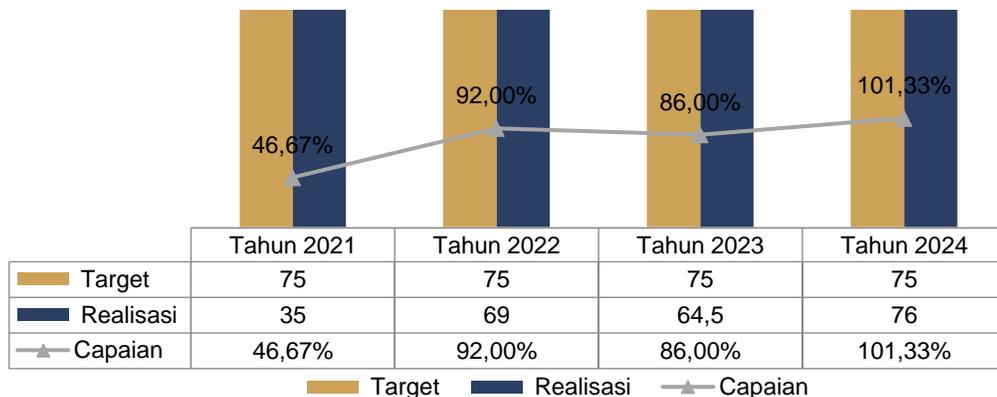




1. Peningkatan kualitas SDM di seksi TSDP melalui diklat atau bimtek, hal ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi petugas yang memeriksa Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
2. Sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan para operator kapal di setiap Pelabuhan penyeberangan;
3. Penerapan sanksi yang tegas kepada perusahaan/operator kapal yang tidak bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 8 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 8. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



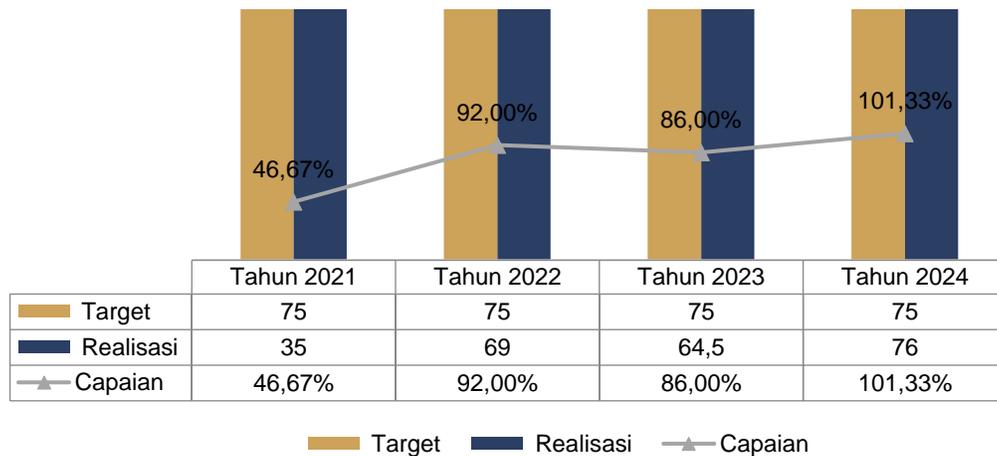
Gambar III. 6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024





f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 8 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020-2024 sebesar 8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 6**. Perbandingan Realisasi Kinerja jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024



Gambar III. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024.. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada tahun 2024 adalah 101%. Berikut perbandingan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II





Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian secara nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	101%	97,31%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Bali memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Bali sudah baik.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pada Provinsi Bali. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam Indikator Kinerja Kegiatan membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.





Tabel II.5 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Capaian
1.	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100%
2.	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5	5%
3.	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	8	8
4.	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	200	200
5.	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85	85

Sumber : Data diolah dari Seksi LLJSDPP, Sarana AJSDP, Prasarana JSDP

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a. Definisi Indikator Kinerja

Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam upaya kampanye keselamatan bertransportasi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali melakukan pemasangan perlengkapan jalan standart di setiap ruas jalan Nasional di Provinsi Bali. Perlengkapan jalan tersebut, meliputi: Lampu Penerangan Jalan, Rambu Lalu Lintas, Guardrail, Paku Jalan, Marka Jalan, Deliniator dan sebagainya.

$$\text{Cara menghitung} = \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan yang telah terpasang}}{\text{Jumlah Kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

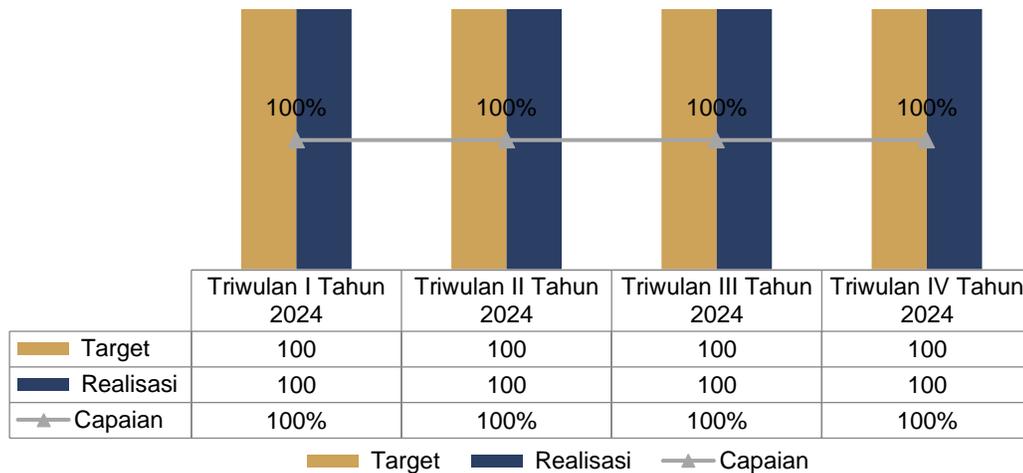
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada tahun 2024 sebesar 100 atau 100% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja





Tahun 2024 yaitu 100%. untuk lebih jelasnya pencapaian realisasi terhadap target, tergambar pada grafik **Gambar II.19** berikut ini :



Gambar II 9 Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan (Lampiran 12), maka ditetapkan untuk pelaksanaan Perlengkapan Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali telah sesuai berdasarkan dasar hukum. **(Lampiran 11)**

• Kronologi Target

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat Perjanjian Kinerja Tahun 2024.





- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal adalah 100%. Dimana hasil capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen. Artinya capaian kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal mencapai target yang sempurna

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu ;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk);
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal senilai Rp. 12.258.817.000 dengan realisasi anggaran di Tahun 2024 Rp. 12.236.775.387 atau mencapai 99,82%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk peningkatan kualitas perlengkapan jalan dengan mengacu kepada kebutuhan dan tingkat urgenitas perlengkapan



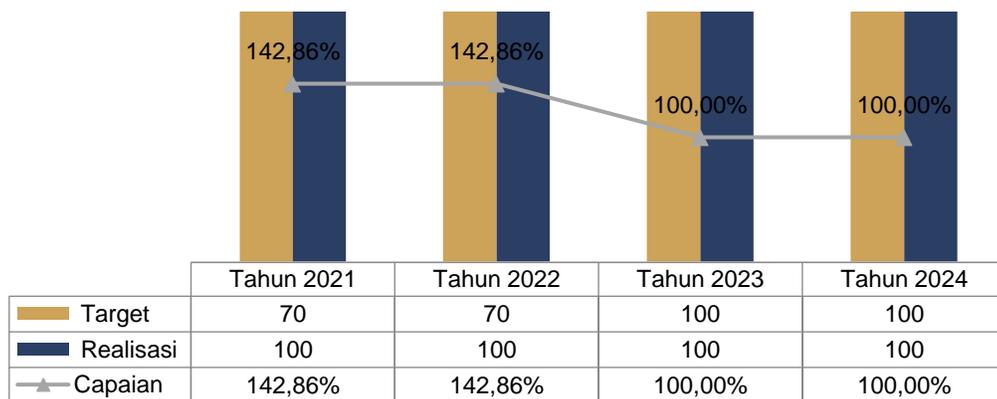


jalan yang harus terpasang di ruas jalan nasional, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Membuat timeline target pelaksanaan kegiatan secara matang;
2. Survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan;
3. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kebutuhan perlengkapan jalan yang belum tersedia di ruas jalan nasional;
4. Inventarisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang untuk mengetahui kondisi perlengkapan jalan tersebut.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2024 sebesar 100% atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Target Realisasi Capaian

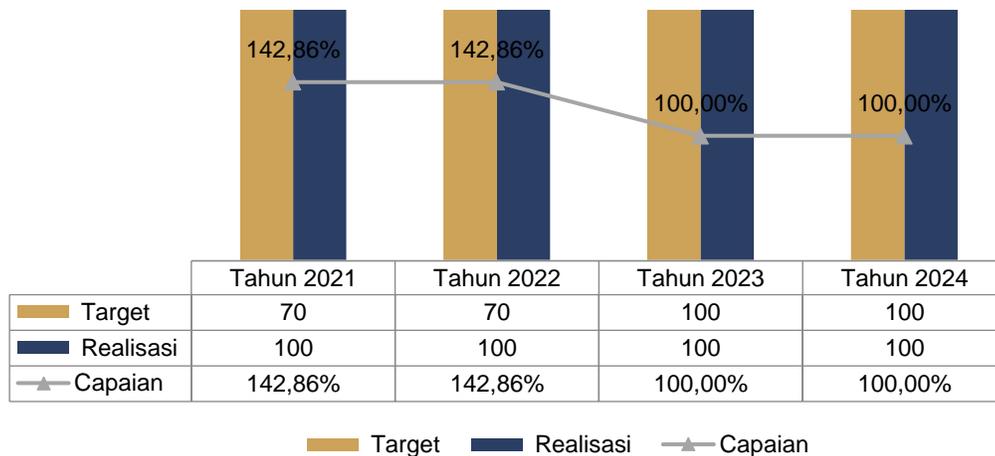
Tabel III. 7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024





f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 - 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.20**.



Gambar III 10 Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :





No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,02%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Bali memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di BPTD Kelas II Bali sudah baik.

IKK 3.2. Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a. Definisi Indikator Kinerja

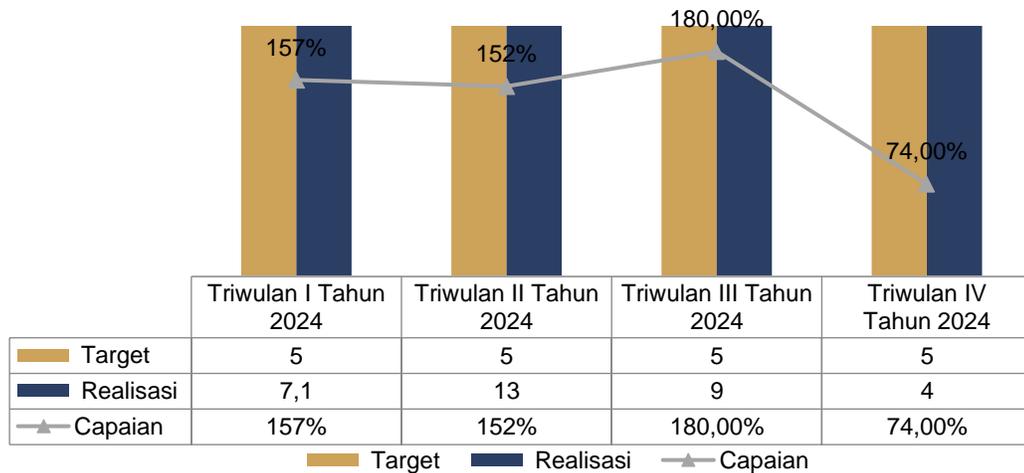
Penilaian terhadap Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali akan dilaksanakan secara simultan pada selama Tahun 2024, dimana target pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang kelebihan muat/dimensi (ODOL) yang memasuki atau keluar di Provinsi Bali pada tahun 2024 adalah sebesar 5%.

$$\text{Cara Menghitung} = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) tahun 2024 sebesar 3,7% atau 5% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Dimana pencapaian ini terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya pencapaian realisasi terhadap target, tergambar pada grafik **Gambar III.21.** berikut ini :





Gambar III 11 Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2024

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1992, khususnya dalam pasal 169 pengaturan pengawasan angkutan barang, diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang yang sesuai berat barang telah diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang sesuai berat muatan yang diizinkan dan dikenakan tindak pelanggaran (tilang) bagi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan (tonase). Berdasarkan peraturan perundangan pengawasan angkutan barang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (**Lampiran 12**).

- **Kronologi Target**

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada Unit Pelaksanaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 5 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dengan





berdasarkan arahan pimpinan pada rapat Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

- **Capaian Kinerja**

Untuk realisasi IKK Persentase Pelanggaran Pada Unit Pelaksanaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan IV sebesar 3,7% dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 5%, sehingga capaiannya dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga:} &= \frac{424}{11367} \times 100\% \\ &= 3,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{(5 - (3,7 - 5))}{5} \times 100 \% \\ &= \frac{6,3}{5} \times 100 \% = 126\% \end{aligned}$$

- **Faktor Keberhasilan**

1. Berkurangnya jumlah pelanggaran angkutan barang;
2. Minimnya jumlah angkutan barang yg ODOL;
3. Berkurangnya jumlah laka lantas akibat angkutan barang.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

1. Praktik pungli dari oknum pegawai;
2. Berkurangnya jumlah angkutan barang yg masuk ke uppkb;
3. Minim pengawasan terhadap angkutan barang yang dapat menyebabkan laka lantas akibat kendaraan barang.





- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Operasional Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2024 senilai Rp. 2.397.020.000 dengan realisasi anggaran di Tahun 2024 Rp. 2.384.917.228 atau mencapai 99,50%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

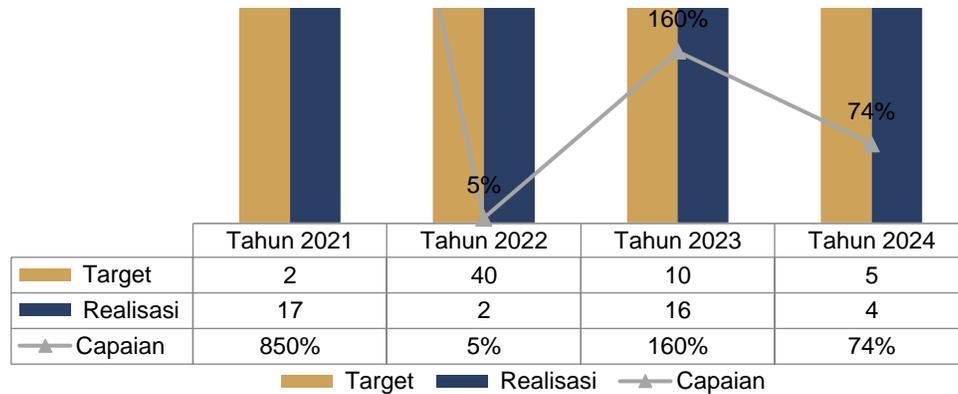
Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan preventif yang diupayakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran (ODOL) pada UPPKB di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi secara aktif kepada pihak owner angkutan barang tentang resiko kendaraan yang masuk kategori ODOL berikut sanksinya;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPPKB;
3. Pengecekan fasilitas alat timbang kendaraan secara berkala pada UPPKB;
4. Penerapan sanksi tegas bagi perusahaan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2024 sebesar 3,7 atau 5% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



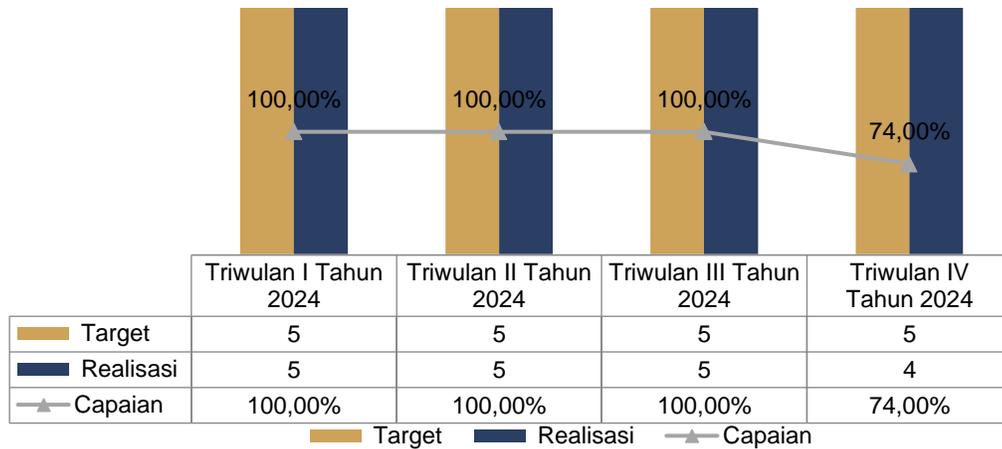


Tabel III. 8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) tahun 2024 sebesar 3,7 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 - 2024 sebesar 3,7 maka capaian kinerja mencapai 74%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.22**.





Gambar III 12 Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2024 adalah 126%. Berikut perbandingan Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	126%	103,93%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Bali sudah memiliki nilai capaian





yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Bali perlu ditingkatkan untuk menekan terjadinya Over Dimension Over Loading (ODOL).

IKK 3.3. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan

a. Definisi Indikator Kinerja

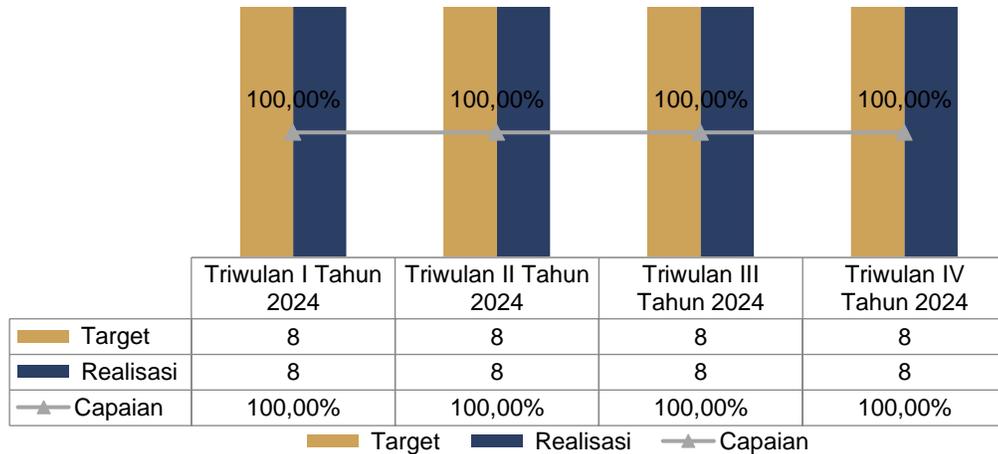
Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada Kawasan sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan Sungai danau dari Lokasi permukiman menuju sekolah. Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, di sekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan. Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Menghitung : *Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun (n)*

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan tahun 2024 sebesar 8 lokasi atau 100% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yaitu 8 lokasi. Dimana pencapaian ini terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya pencapaian realisasi terhadap target, tergambar pada grafik **Gambar III.21.** berikut ini :





Gambar III 13 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum**

Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Tentang Zona Selamat Sekolah. **(Lampiran 13)**

- Kronologi Target**

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan memiliki target 8 lokasi yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

- Capaian Kinerja**

Untuk realisasi IKK Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Triwulan IV sebesar 8 dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 8, sehingga capaiannya dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$





- **Faktor Keberhasilan**

1. Perencanaan lokasi yang tepat;
2. Partisipasi pihak sekolah dan meningkatnya kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas;
3. Evaluasi dan penyesuaian terhadap kegiatan pembangunan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

1. Minimnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang rendah;
2. Masih rendahnya penegakan hukum;
3. Pemilihan lokasi yang kurang tepat.

- **Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Triwulan IV senilai Rp. 2.700.000.000 dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2024 Rp. 2.697.657.500 atau mencapai 99.91%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan preventif yang diupayakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan khususnya di wilayah provinsi Bali, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

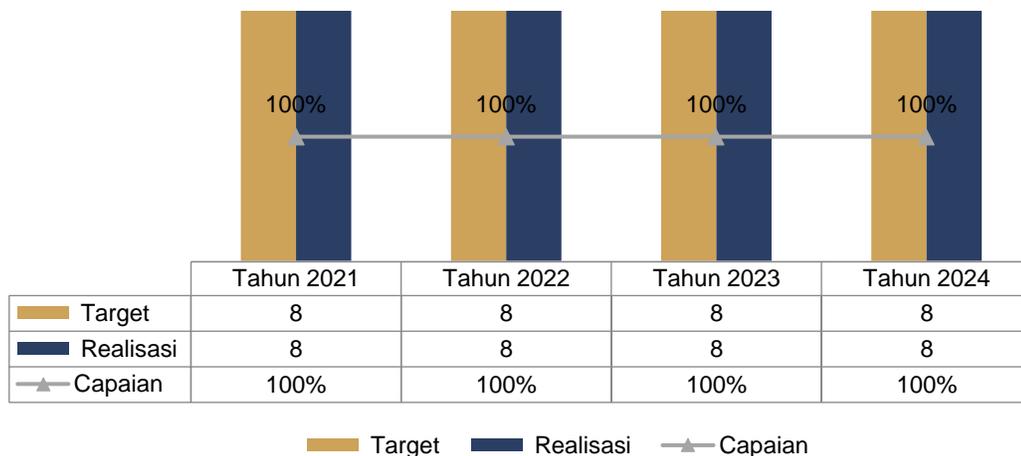
1. Peningkatan kesadaran dan pendidikan;
2. Peningkatan teknologi dan inovasi;
3. Penggunaan data dan evaluasi dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan.





e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2024 sebesar 8 lokasi atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 8 lokasi. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

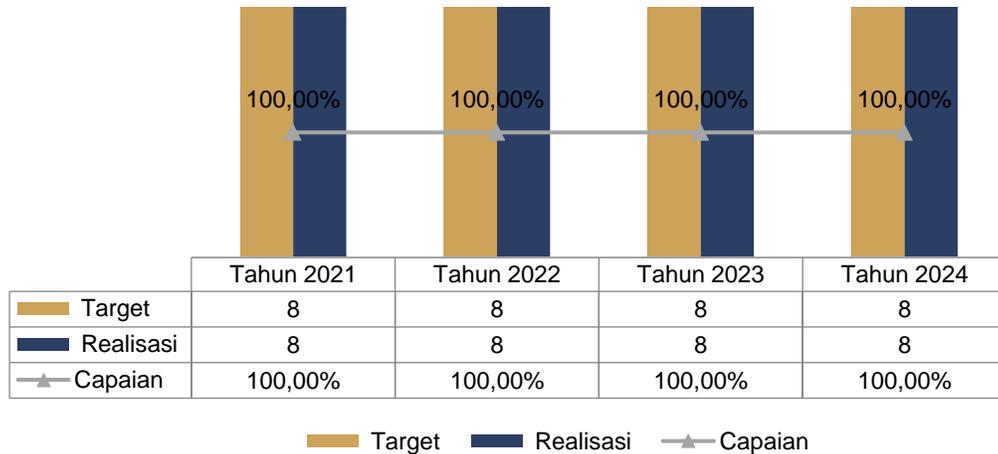


Tabel III. 9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan tahun 2024 sebesar 8 lokasi jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 - 2024 sebesar 8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.22**.





Gambar III 14 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan dari tahun 2021-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	74,69%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas kecepatan BPTD Kelas II Bali memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di BPTD Kelas II Bali sudah baik.





IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

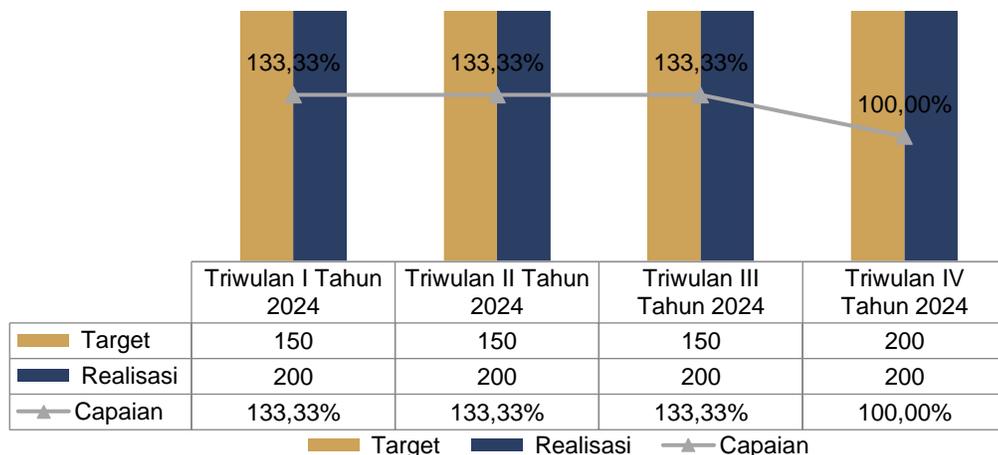
a. Definisi Indikator Kinerja

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di bidang Perhubungan Darat terutama di bidang keselamatan bertransportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan arti penting (edukasi) keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat. Untuk maksud tersebut dilakukan sosialisasi khusus yang dilaksanakan pada Triwulan ke II Tahun 2024, dimana targetnya adalah 200 orang. Untuk pencapaian kegiatan pada Tahun 2024, telah terealisasi sebesar 100%.

Cara Menghitung : *Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ*

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun 2024 sebesar 200 orang. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024 sebesar 200 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.27**. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.



Gambar III 15 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024





c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **(Lampiran 14)**.

- **Kronologi Target**

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan memiliki target 200 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

- **Capaian Kinerja**

Persentase Capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi karena pada halnya Sosialisasi Pekan Keselamatan Jalan telah dilaksanakan pada Minggu kedua bulan juni di Tahun 2024 sebanyak 200 orang.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{200}{200} \times 100\% = 100$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan tepat sasaran;
2. Materi sosialisasi sesuai dengan target;
3. Sosialisasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi





Tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Pelaksanaan tidak tepat sasaran;
2. Materi sosialisasi tidak sesuai dengan target;
3. Pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif.

- **Anggaran**

Adapun anggaran terkait kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 senilai Rp. 350.000.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 348.984.000,- atau mencapai 99,71%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

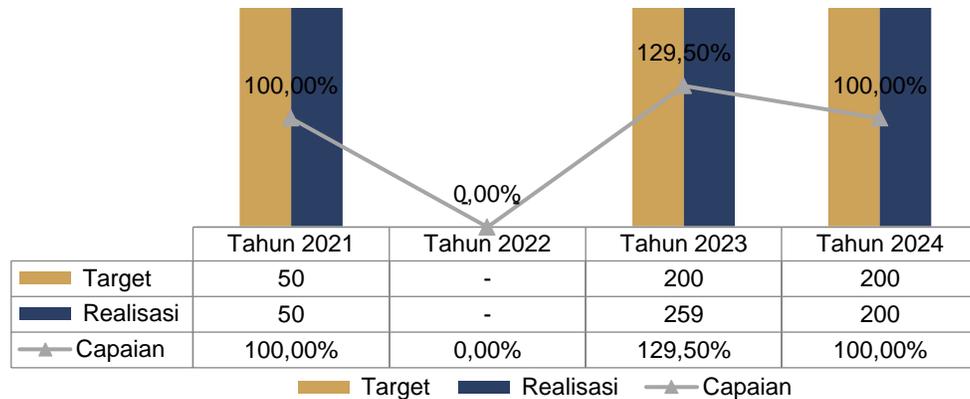
Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang dalam upaya pemenuhan terhadap Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan, dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada berbagai unsur masyarakat dari berbagai usia, mengenai arti penting keselamatan Transportasi Jalan;
2. Melaksanakan kegiatan rutin seperti Pekan Keselamatan Jalan dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2024 sebesar 200 orang atau 133% dari target yang telah ditetapkan sebesar 150 orang. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



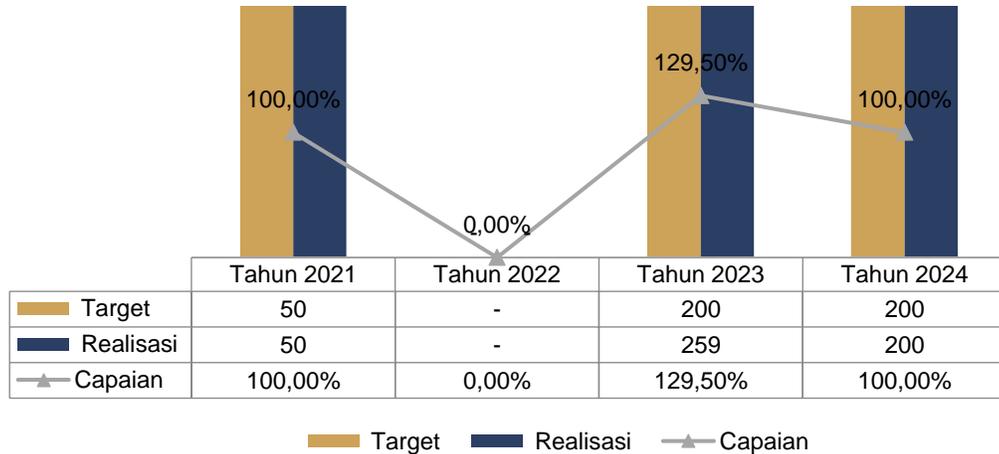


Tabel III. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 200 orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 - 2024 sebesar 500 orang maka capaian kinerja mencapai 40%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 28** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.





Gambar III.16 Perbandingan Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	112,22%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan BPTD Kelas II Bali memiliki nilai capaian yang lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan BPTD Kelas II Bali sudah baik.





IKK 3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Definisi Indikator Kinerja

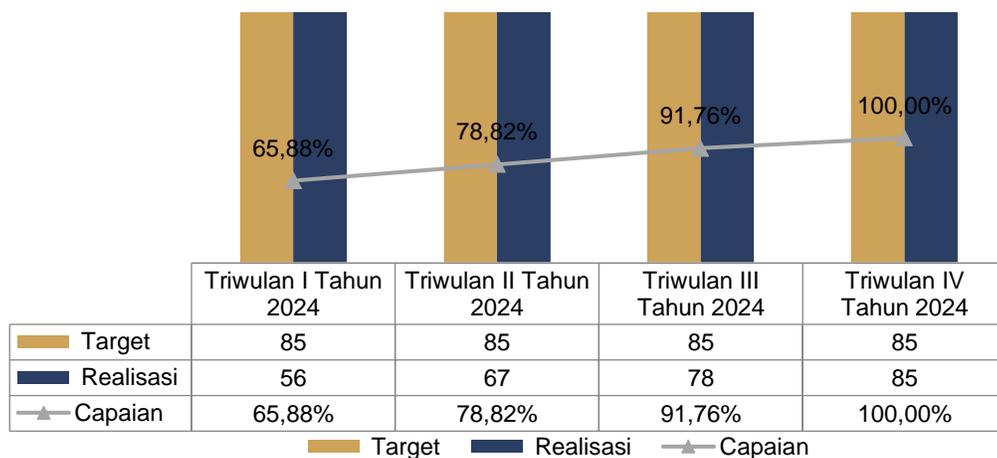
Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang merupakan kegiatan rutin Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dilakukan pada setiap Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh standarisasi dari alat pengujian kendaraan bermotor melalui pengkalibrasian agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Cara Menghitung

$$= \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta+Kota+Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.31**. Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



Gambar III 17 Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024





c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. **(Lampiran 15)**

- **Kronologi Target**

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki target 85 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor : = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{85}{85} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Meningkatnya jumlah prasarana dan personil yg dimiliki UPUBKB kab/kota;
2. Ketersediaan anggaran operasional UPUBKB kab/kota;
3. Meningkatnya jumlah alat yang telah terkalibrasi.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Minimnya jumlah prasarana dan personil yg dimiliki UPUBKB kab/kota;
2. Tidak tersedianya anggaran operasional UPUBKB kab/kota;
3. Minimnya jumlah alat yang telah terkalibrasi.





- **Realisasi Anggaran**

Jumlah anggaran pada kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 580.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 579.768.061 atau 99,96 %.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

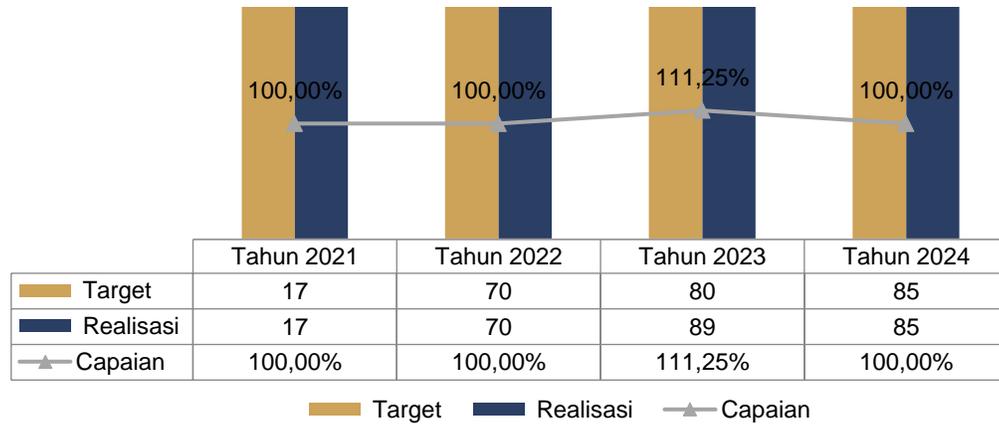
Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang dalam upaya peningkatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Peningkatan fasilitas pengkalibrasian alat uji kendaraan bermotor;
2. Peningkatan kualitas SDM pegawai yang bertugas melaksanakan Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor melalui Bimtek atau Diklat;
3. Membuat time schedule pelaksanaan Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Bali secara berkala.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2024 sebesar 85 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85 dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2024. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



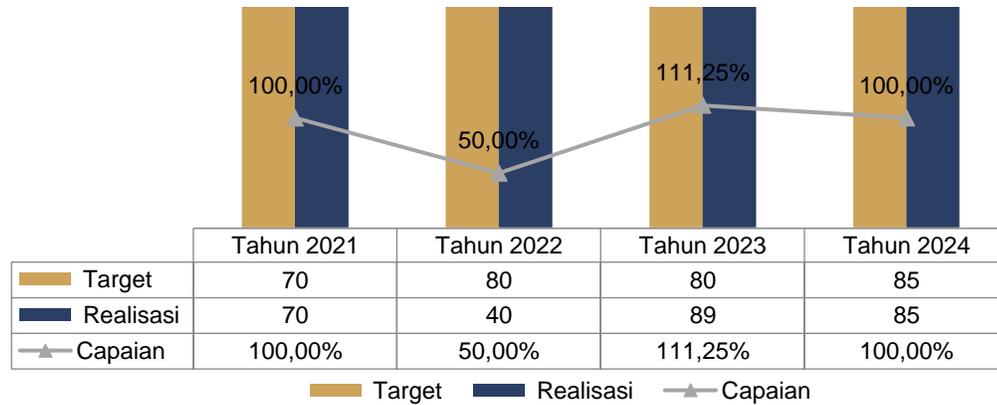


Tabel III. 11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar 85 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020 - 2024 sebesar 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 32** Perbandingan Realisasi Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024.





Gambar III 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024.. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,20%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, maka capaian Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Bali memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor di BPTD Kelas II Bali sudah baik.





Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pada Provinsi Bali. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam Indikator Kinerja Kegiatan membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Tabel II.6 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Capaian
1.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	%	100	100%

Sumber : Data Diolah dari Sub bagian Tata Usaha





IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. Definisi Indikator Kinerja

Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Untuk menghitung Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

Keterangan:

Aspek Penilaian:

- a. Indeks SPBE Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- b. Indeks Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- c. Indeks Profesionalisme ASN Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- d. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- e. Nilai SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- f. Indeks Pengawasan Kearsipan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- g. Indeks Maturitas SPIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- h. Indeks Perencanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- i. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat;
- j. Indeks Pengelolaan Aset Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- k. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- l. Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat;

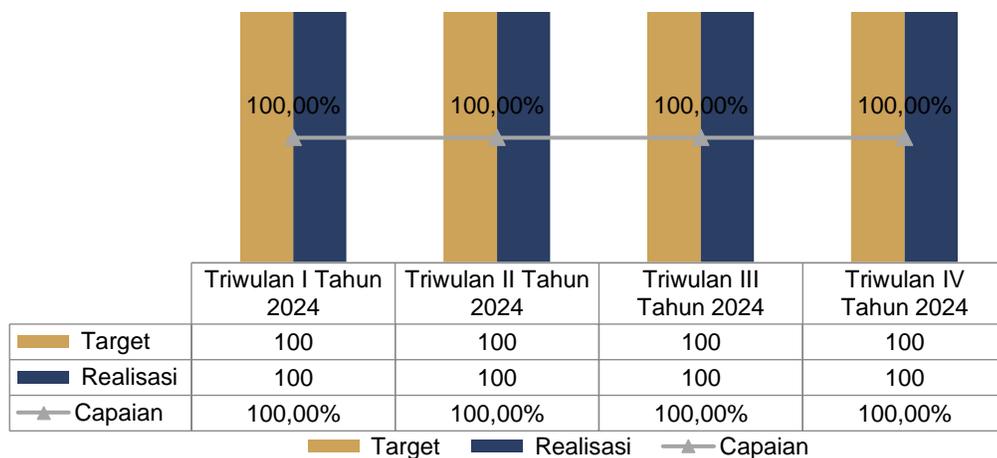




- m. Reputasi Positif Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
- n. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, dokumentasi kegiatan pada Lampiran 5 laporan ini.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.35**.



Gambar III 19 Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No.12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat. **(Lampiran 16)**





- **Kronologi Target**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki target 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2024 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyusunan bahan RKA;
2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD;
3. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;
4. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
5. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
6. Kalibrasi alat uji;
7. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;
8. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Bali;
9. Pengawasan Gakum;





10. Pengiriman Pegawai Diklat;
11. Penyidikan dan pendampingan pasal 277 UU Tahun 2009;
12. Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait;
3. SDM yang bersolidaritas.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor potensi Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran;
2. Kurangnya SDM yang ada;
3. SDM belum memiliki sertifikasi atau kompetensi di bidang terkait sehingga kegiatan belum terlaksana secara optimal.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 yaitu Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan senilai Rp. 3.978.509.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 3.967.112.984 atau mencapai 99,71%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

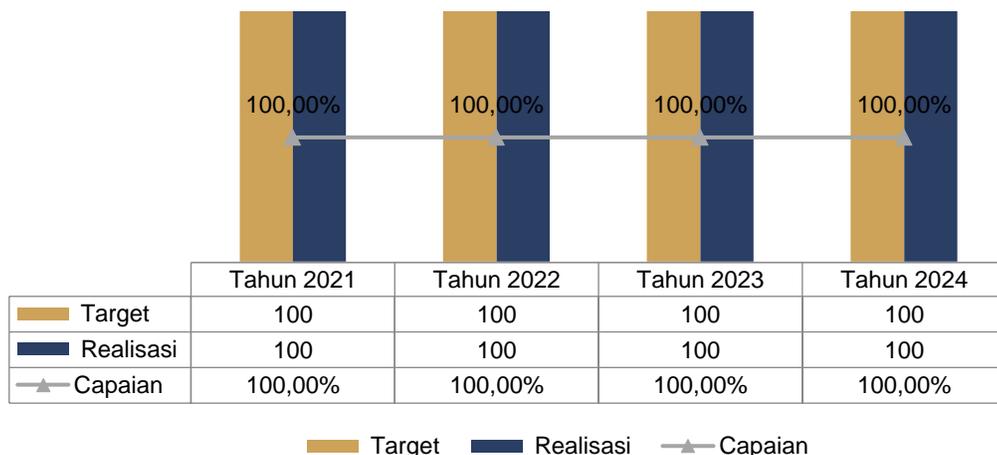




1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;
3. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;
4. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2024 sebesar 100 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



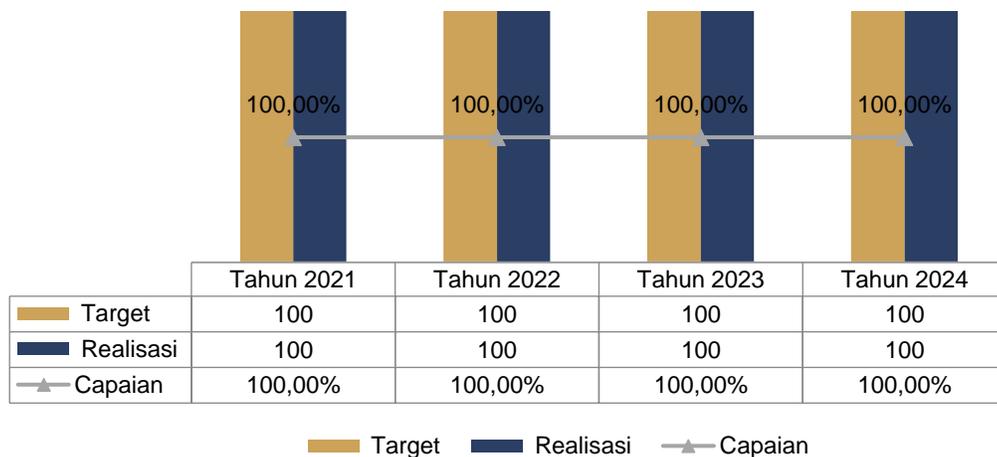
Tabel III. 12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024





f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.36**.



Gambar III 20 Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :





No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	101,39%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, maka capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat di BPTD Kelas II Bali memiliki capaian yang lebih rendah. Akan tetapi sudah menunjukkan persentase angka yang baik yaitu 100%,

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pada Provinsi Bali. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam Indikator Kinerja Kegiatan membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.





Tabel II.7 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Capaian
1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	%	100	100%

Sumber : Data Diolah dari Sub bagian Tata Usaha

IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

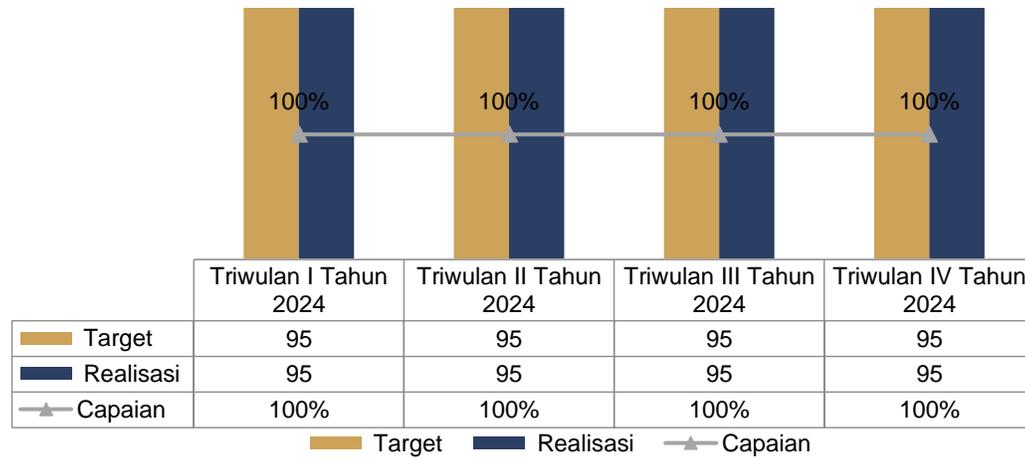
a. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan keberhasilan pelaksanaan administrasi perkantoran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, seperti : administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi teknis lainnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024

Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 95 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 95 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7. Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.





Gambar II 21 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk kegiatan untuk kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**Lampiran 17**);
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**Lampiran 18**).

- **Kronologi Target**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target 95 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.





Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali pada tahun 2024 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Bali. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap, yaitu :

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
2. Honorarium Satuan Kerja;
3. Honorarium ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP;
4. Gaji dan Tunjangan Pegawai.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2024, Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 95 atau 100 %. Dimana target dalam tahun 2024 secara keseluruhan adalah mencapai nilai 95 untuk tahun 2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Tersedianya SDM berkompeten;
2. Kegiatan pelayanan perkantoran sudah terlaksana sesuai dengan *timeline*;
3. Evaluasi secara rutin setiap bulannya.

- **Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompeten;
2. Pengurangan Anggaran;





3. Belum berjalannya *Reward* untuk pegawai yang telah berkontribusi secara baik di Kantor BPTD Kelas II Bali dan *Punishment* untuk pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai.

- **Anggaran**

Adapun anggaran terkait indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 Operasional dan Pemeliharaan Kantor senilai Rp. 26.642.323.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 26.507.426.259 atau mencapai 99,49 %.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

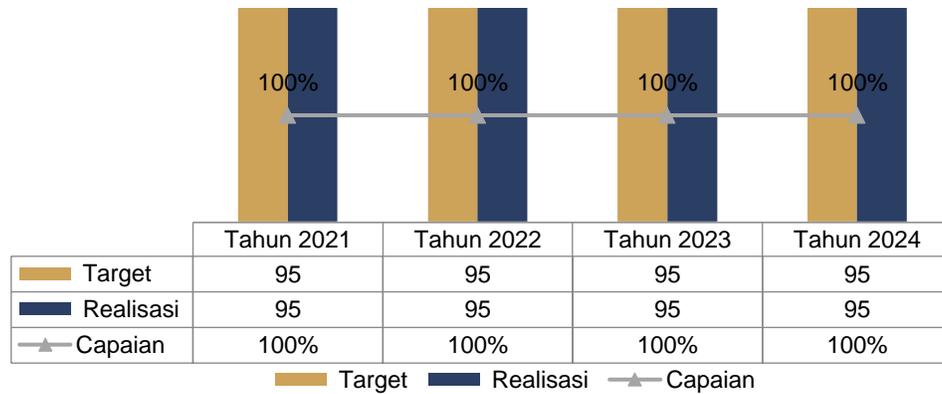
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan motivasi kepada seluruh pegawai oleh Kepala Balai terkait pentingnya, peningkatan akuntabilitas baik di bidang Kepegawaian, Keuangan dan aspek teknis lainnya;
2. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2024 sebesar 95 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

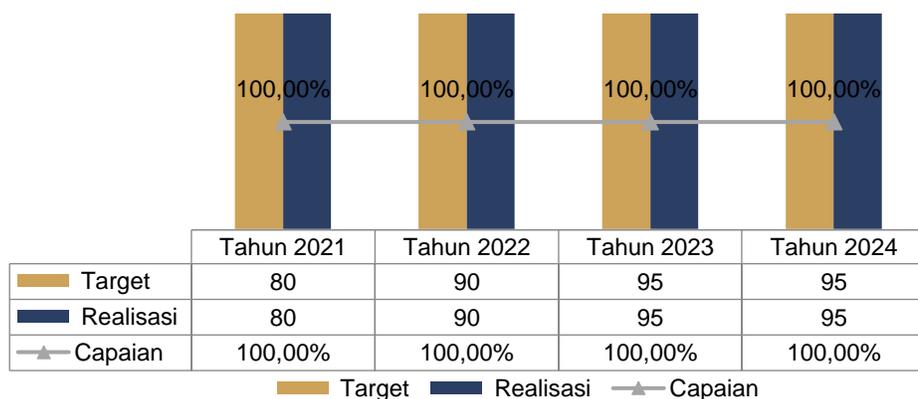




Tabel III. 13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023, dan Tahun 2024

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024

Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024 sebesar 95 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.36.



Gambar III 22 Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2024





g. Benchmark Nasional/Internasional

Untuk Benchmark Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Bali Tahun 2024, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Berikut Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Bali Tahun 2024 dengan rata-rata nasional dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Uraian	BPTD Kelas II Bali	Rata-rata Nasional
1.	Persentase Capaian Kinerja	100%	98,74%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, maka capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Bali memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat BPTD Kelas II Bali sudah baik.





BAB III REALISASI ANGGARAN

III. 1. REALISASI ANGGARAN Alokasi Anggaran Tahun 2024

III.3.1.1. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 113.027.469.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 14 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp. 106.876.475.000,-	94,55%
PNBP	Rp. 6.150.994.000,-	5,45%
SBSN	Rp. -	0%
Total	Rp. 113.027.469.000,-	100%

Tabel III. 15 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp. 16.171.131.000	14,30%
Belanja Barang	Rp. 63.165.237.000	55,88%
Belanja Modal	Rp. 33.691.101.000	29,82%
Total	Rp. 113.027.469.000	100%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali TA. 2024 akibat adanya Revisi DIPA di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 9.445.419.000,- Sehingga Total Pagu akhir DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali pada Triwulan IV TA. 2024 adalah sebesar Rp. 122.472.888.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 16 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2024

RM	Rp. 116.321.894.000	94%
PNBP	Rp. 6.150.994.000	6%
SBSN	Rp. -	0%
Total	Rp. 122.472.888.000	100%

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali





Tabel III. 17 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2024

Belanja Pegawai	Rp. 26.642.323.000	21,75%
Belanja Barang	Rp. 61.512.200.000	50,22%
Belanja Modal	Rp. 34.318.365.000	28,02%
Total	Rp. 122.472.888.000	100%

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

Pengurangan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 24 November 2023 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (**Lampiran 19**);
- Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-1) (**Lampiran 20**);
- Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-2) (**Lampiran 21**);
- Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-3) (**Lampiran 22**);
- Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Pengesahan Revisi





- Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-4) **(Lampiran 23)**;
- f. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-5) **(Lampiran 24)**;
- g. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-6) **(Lampiran 25)**;
- h. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-7) **(Lampiran 26)**;
- i. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-8) **(Lampiran 27)**;
- j. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-9) **(Lampiran 28)**;
- k. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-10) **(Lampiran 29)**;
- l. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 11 Oktober 2024 perihal Pengesahan Revisi





Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-11) **(Lampiran 30)**;

- m. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-12) **(Lampiran 31)**;
- n. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-13) **(Lampiran 32)**;
- o. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-14) **(Lampiran 33)**;
- p. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-15) **(Lampiran 34)**;
- q. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-16) **(Lampiran 35)**;
- r. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-17) **(Lampiran 36)**.





III.3.1.2. Refocussing Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor : SP DIPA-022.03.2.403852/2022 tanggal 20 Desember 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-17) sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebesar Rp. 9.445.419.000,- sehingga dari pagu awal sebesar Rp. 113.027.469.000,- menjadi Rp. 122.472.888.000,-. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel III. 18 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	113.027.469.000	-	-	113.027.469.000
REVISI KE-1	113.027.469.000	-	-	113.027.469.000
REVISI KE-2	113.027.469.000	-	-	113.027.469.000
REVISI KE-3	113.027.469.000	-	-	113.027.469.000
REVISI KE-4	113.027.469.000	-	-	113.027.469.000
REVISI KE-5	112.574.299.000	6.150.994.000	-	118.725.293.000
REVISI KE-6	112.574.299.000	6.150.994.000	-	118.725.293.000
REVISI KE-7	112.574.299.000	6.150.994.000	-	118.725.293.000
REVISI KE-8	111.710.212.000	6.150.994.000	-	117.861.206.000
REVISI KE-9	115.630.543.000	6.150.994.000	-	121.781.537.000
REVISI KE-10	115.630.543.000	6.150.994.000	-	121.781.537.000
REVISI KE-11	115.630.543.000	6.150.994.000	-	121.781.537.000
REVISI KE-12	115.630.543.000	6.150.994.000	-	121.781.537.000
REVISI KE-13	117.121.894.000	6.150.994.000	-	123.272.888.000





REVISI KE-14	117.121.894.000	6.150.994.000	-	123.272.888.000
REVISI KE-15	117.121.894.000	6.150.994.000	-	123.272.888.000
REVISI KE-16	116.321.894.000	6.150.994.000	-	122.472.888.000
REVISI KE-17	116.321.894.000	6.150.994.000	-	122.472.888.000

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

Tabel III. 19 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2024

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	16.171.131.000	63.165.237.000	33.691.101.000	113.027.469.000
REVISI KE-1	16.171.131.000	63.165.237.000	33.691.101.000	113.027.469.000
REVISI KE-2	16.171.131.000	63.165.237.000	33.691.101.000	113.027.469.000
REVISI KE-3	16.171.131.000	63.165.237.000	33.691.101.000	113.027.469.000
REVISI KE-4	16.171.131.000	63.165.237.000	33.691.101.000	113.027.469.000
REVISI KE-5	23.521.992.000	61.512.200.000	33.691.101.000	118.725.293.000
REVISI KE-6	23.521.992.000	61.512.200.000	33.691.101.000	118.725.293.000
REVISI KE-7	23.521.992.000	61.512.200.000	33.691.101.000	118.725.293.000
REVISI KE-8	23.521.992.000	61.512.200.000	32.827.014.000	117.861.206.000
REVISI KE-9	27.442.323.000	61.512.200.000	32.827.014.000	121.781.537.000
REVISI KE-10	27.442.323.000	61.512.200.000	32.827.014.000	121.781.537.000
REVISI KE-11	27.442.323.000	61.512.200.000	32.827.014.000	121.781.537.000
REVISI KE-12	27.442.323.000	61.512.200.000	32.827.014.000	121.781.537.000



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
REVISI KE-13	27.442.323.000	61.512.200.000	34.318.365.000	123.272.888.000
REVISI KE-14	27.442.323.000	61.512.200.000	34.318.365.000	123.272.888.000
REVISI KE-15	27.442.323.000	61.512.200.000	34.318.365.000	123.272.888.000
REVISI KE-16	26.642.323.000	61.512.200.000	34.318.365.000	122.472.888.000
REVISI KE-17	26.642.323.000	61.512.200.000	34.318.365.000	122.472.888.000

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Tabel III. 20 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	16.171.131.000	0	16.171.131.000	7.350.861.000	23.521.992.000	3.920.331.000	27.442.323.000	800.000.000	26.642.323.000
Belanja Barang	63.165.237.000	0	63.165.237.000	1.653.037.000	61.512.200.000	0	61.512.200.000	0	61.512.200.000
· RM	106.876.475.000								
· PNBP	6.150.994.000								
Belanja Modal	33.691.101.000	0	33.691.101.000	0	33.691.101.000	864.087.000	32.827.014.000	1.491.351.000	34.318.365.000
· RM									
· PNBP									
· SBSN									
TOTAL	226.054.938.000	0	113.027.469.000	9.003.898.000	118.725.293.000	4.784.418.000	121.781.537.000	2.291.351.000	122.472.888.000

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 21 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
022.03	BPTD Kelas II Bali	113.027.469.000	123.272.888.000	23.866.787.636	19,36	123.272.888.000	57.744.102.834	46,84	113.027.469.000	86.373.369.920	70,92	122.472.888.000	115.669.020.624	94,44
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	86.383.932.000	88.358.159.000	13.876.673.803	15,70	88.358.159.000	39.286.353.486	44,46	86.866.808.000	60.680.611.085	69,85	88.358.159.000	81.952.907.646	92,75
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	29.895.648.000	26.194.528.000	1.303.898.000	4,98	26.194.528.000	7.659.996.979	29,24	26.194.528.000	17.120.746.937	65,36	26.194.528.000	23.413.056.327	89,38
4638	Pelayanan Transportasi Darat	25.549.904.000	26.781.404.000	2.636.138.695	9,84	26.781.404.000	8.873.317.960	33,13	26.781.404.000	15.800.826.154	59,86	26.781.404.000	25.863.830.238	96,57
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	29.802.446.000	31.246.293.000	9.561.026.883	30,60	31.246.293.000	21.500.040.147	68,81	29.754.942.000	25.630.685.716	86,14	31.246.293.000	28.708.908.097	91,88
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.135.934.000	4.135.934.000	375.610.225	9,08	4.135.934.000	1.252.998.400	30,30	4.135.934.000	2.128.352.278	51,46	4.135.934.000	3.967.112.984	95,92
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	23.643.537.000	34.914.729.000	9.990.113.033	28,61	34.914.729.000	18.457.749.338	52,86	34.914.729.000	25.692.758.835	73,58	34.114.729.000	33.716.112.978	98,83
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	120.000.000	120.000.000	30.096.469	25,08	120.000.000	112.976.857	94,15	120.000.000	119.671.857	99,73	120.000.000	119.671.857	99,73

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.352.406.000	7.352.406.000	2.338.119.249	31,80	7.352.406.000	3.272.364.894	44,51	7.352.406.000	4.822.557.246	65,59	7.352.406.000	7.089.018.096	96,42
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	16.171.131.000	27.442.323.000	7.621.897.315	27,77	27.442.323.000	15.072.407.587	54,92	27.442.323.000	20.750.529.732	75,62	26.642.323.000	26.507.423.025	99,49

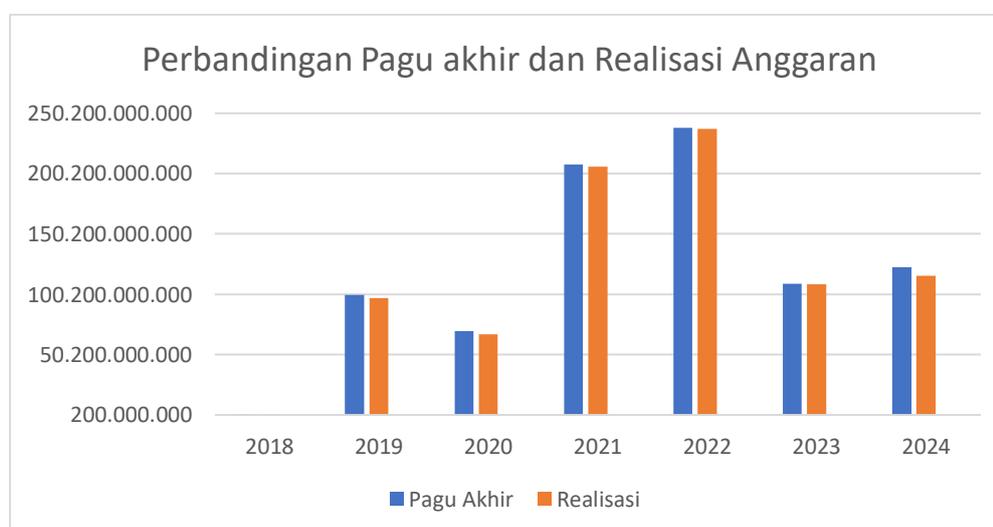


III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2018 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 22 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – Tahun 2024

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2018	517,530,000	517,269,996	517,269,996	99,95%
2	2019	99,809,769,000	99,809,769,000	96,869,353,051	97,05%
3	2020	69,765,971,000	69,765,971,000	66,884,690,863	95,87%
4	2021	207,505,364,000	207.505.364.000	205.890.141.546	99,22%
5	2022	329.189.194.000	238,120,499,000	237,202,990,068	99,61%
6	2023	137.224.808.000	108.994.545.000	108,403,324,424	99,46%
7	2024	113.027.469.000	122.472.888.000	115.669.020.624	94,44%



Gambar III 23 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 205.890.141.546,- atau mencapai 99,22% dari pagu akhir Rp. 207.505.364.000,-. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 237.202.990.068,- atau mencapai 99,61% dari pagu akhir Rp. 238.120.499.000,-. Pada Tahun 2024 dengan pagu akhir Rp. 122.472.888.000 terealisasi sebesar Rp. 115.669.020.624



3.2 Realisasi Anggaran

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 23 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
022.03	BPTD Kelas II Bali	113.027.469.000	123.272.888.000	23.866.787.636	19,36	123.272.888.000	57.744.102.834	46,84	113.027.469.000	86.373.369.920	70,92	122.472.888.000	115.669.020.624	94,44
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	86.383.932.000	88.358.159.000	13.876.673.803	15,70	88.358.159.000	39.286.353.486	44,46	86.866.808.000	60.680.611.085	69,85	88.358.159.000	81.952.907.646	92,75
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	29.895.648.000	26.194.528.000	1.303.898.000	4,98	26.194.528.000	7.659.996.979	29,24	26.194.528.000	17.120.746.937	65,36	26.194.528.000	23.413.056.327	89,38
4638	Pelayanan Transportasi Darat	25.549.904.000	26.781.404.000	2.636.138.695	9,84	26.781.404.000	8.873.317.960	33,13	26.781.404.000	15.800.826.154	59,86	26.781.404.000	25.863.830.238	96,57
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	29.802.446.000	31.246.293.000	9.561.026.883	30,60	31.246.293.000	21.500.040.147	68,81	29.754.942.000	25.630.685.716	86,14	31.246.293.000	28.708.908.097	91,88
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.135.934.000	4.135.934.000	375.610.225	9,08	4.135.934.000	1.252.998.400	30,30	4.135.934.000	2.128.352.278	51,46	4.135.934.000	3.967.112.984	95,92
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	23.643.537.000	34.914.729.000	9.990.113.033	28,61	34.914.729.000	18.457.749.338	52,86	34.914.729.000	25.692.758.835	73,58	34.114.729.000	33.716.112.978	98,83

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	120.000.000	120.000.000	30.096.469	25,08	120.000.000	112.976.857	94,15	120.000.000	119.671.857	99,73	120.000.000	119.671.857	99,73
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.352.406.000	7.352.406.000	2.338.119.249	31,80	7.352.406.000	3.272.364.894	44,51	7.352.406.000	4.822.557.246	65,59	7.352.406.000	7.089.018.096	96,42
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	16.171.131.000	27.442.323.000	7.621.897.315	27,77	27.442.323.000	15.072.407.587	54,92	27.442.323.000	20.750.529.732	75,62	26.642.323.000	26.507.423.025	99,49

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 115.669.020.624,-** atau mencapai **94,44%** dari total pagu sebesar **Rp. 122.472.888.000,-**.



III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan I s.d IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 24 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI			PAGU	REALISASI			PAGU	REALISASI			PAGU	REALISASI		
		ALOKASI (TW I)	TW I			ALOKASI (TW II)	TW II			ALOKASI (TW III)	TW III			ALOKASI (TW IV)	TW IV		
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	
1	Belanja Pegawai	27.442.323	7.621.897	27,77	27.442.323	15.072.407	54,92	27.442.323	20.750.529	75,62	26.642.323	26.507.423	99,49				
2	Belanja Barang	61.512.200	8.288.077	13,47	61.512.200	22.368.038	36,36	61.512.200	37.545.640	61,04	61.512.200	54.892.101	89,24				
3	Belanja Modal	34.318.365	7.956.813	23,19	34.318.365	20.303.656	59,16	34.318.365	28.077.199	81,81	34.318.365	34.269.495	99,86				
TOTAL		123.272.888	23.866.787	19,36	123.272.888	87.503.850	46,84	123.272.888	123.272.888	70,07	122.472.888	115.669.020	94,44				

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 dari Triwulan I s.d IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 19,36% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 46,84% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 70,07%. Pada akhir Triwulan IV 2024, penyerapan akhir mencapai 94,44%.

III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan I s.d IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

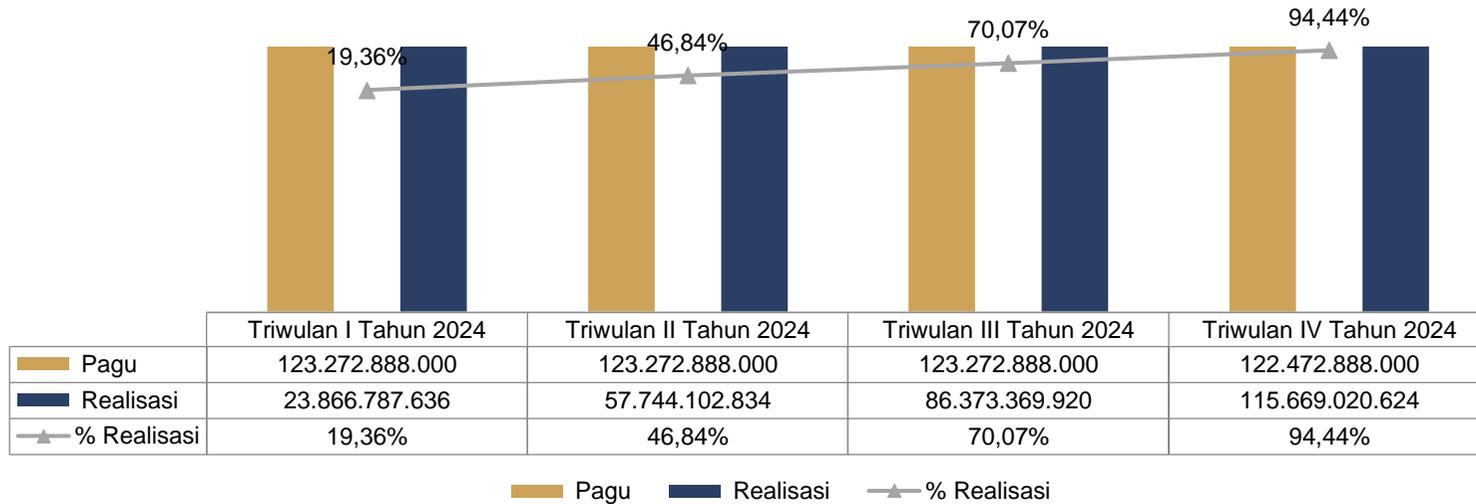
Tabel III. 25 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan IV 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		ALOKASI (TW I)	TW I		ALOKASI (TW II)	TW II		ALOKASI (TW III)	TW III		ALOKASI (TW IV)	TW IV	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%
1	Rupiah Murni	117.121.894	22.414.501	19,14	117.121.894	54.223.479	46,30	117.121.894	80.306.373	68,57	116.321.894	109.518.853	94,15
2	PNBP	6.150.994	1.452.286	23,61	6.150.994	3.520.622	57,24	6.150.994	6.066.996	98,63	6.150.994	6.150.167	99,99
3	SBSN												
TOTAL		123.272.888	23.866.787	19,36	123.272.888	57.744.102	46,84	123.272.888	86.373.369	70,07	122.472.888	115.669.020	94,44

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Gambar III 24 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran s.d Triwulan IV Tahun 2024



Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I realisasi hanya sebesar 19,36% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 46,84%. Pada Triwulan III yaitu mencapai 70,07% dan juga terus meningkat pada Triwulan IV dengan penyerapan akhir sebesar 94,44%.

III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 26 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	26,642,323,000	26,507,423,0251	134,899,975
2	Belanja Barang	61,512,200,000	54,892,101,702	6,620,098,298
3	Belanja Modal	28,167,371,000	28,119,328,415	48,042,585
TOTAL		122,472,888,000	115,669,020,624	6,803,867,376

Tabel III. 27 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	116,321,894,000	109,518,853,142	6,803,040,858
2	PNBP	6,150,994,000	6,150,167,482	826,518
3	SBSN			
TOTAL		122,472,888,000	115,669,020,624	6,803,867,376



Tabel III. 28 Rincian sisa Anggaran Tahun 2024

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-
2	Kegiatan yang Terblokir		-
3	Sisa Kontraktual		-
	a. Belanja Barang		-
	b. Belanja Modal		-
4	Sisa Non Kontraktual		-
	a. Belanja Barang	61,512,200,000	54,892,101,702
	b. Belanja Modal	28,167,371,000	28,119,328,415
5	Sisa Belanja Pegawai	26,642,323,000	26,507,423,025
TOTAL			115,669,020,624

Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebesar Rp 122,472,888,000,- (Seratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 115,669,020,624,- (Seratus lima belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 94,44% sehingga total dana yang tidak terserap pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah sebesar Rp 6,803,867,376,- (Enam milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar 5,56%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Tidak Ada Kegiatan yang terblokir;
3. Kegiatan Kontraktual semuanya telah terlaksana sesuai jadwal;
4. Sisa sumber dana PNBPN sebesar Rp. 826.518,-
5. Sisa Belanja Pegawai Rp 134,899,975,- (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah).

Terdapat sisa belanja pegawai yang disebabkan terdapat kebijakan tidak dicairkannya gaji dan tunjangan ke-14 di Tahun 2024.



III.3.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kegiatan per Triwulan I s.d IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 29 Efisiensi anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	75,34%	56,64%	18,70%	18,70%	56,64%	41,02%	96,66%	57,53%	39,13%	100%	99,53%	0,47%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	102%	82,85%	19,15%	104,5%	42,54%	61,96%	104,5%	52,59%	51,91%	102,5%	99,31%	0,69%
3	SK3 Meningkatkan Keselamatan	79,86%	15,77%	64,09%	133,2%	71,77%	61,43%	104,8%	78,6%	26,2%	100%	99,72%	0,28%

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
Transportasi Darat													
4	SK4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100%	47,13%	52,87%	100%	71,50%	28,5%	100%	51,46%	48,54%	100%	99,71%	0,29%
5	SK5 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	100%	47,13%	52,87%	100%	71,50%	28,5%	100%	75,62%	24,38%	100%	99,49%	0,51%
Total		91,44%	21,96%	70,42%	104,23%	51,71%	52,52%	101,19%	63,16%	38,03%	100,5%	99,55%	0,95%

Berdasarkan data di atas pada Triwulan IV dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,5%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,55% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,95%.



III.3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia per Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.18 Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	564	275	48,75%	71,83	72,05	100,31%

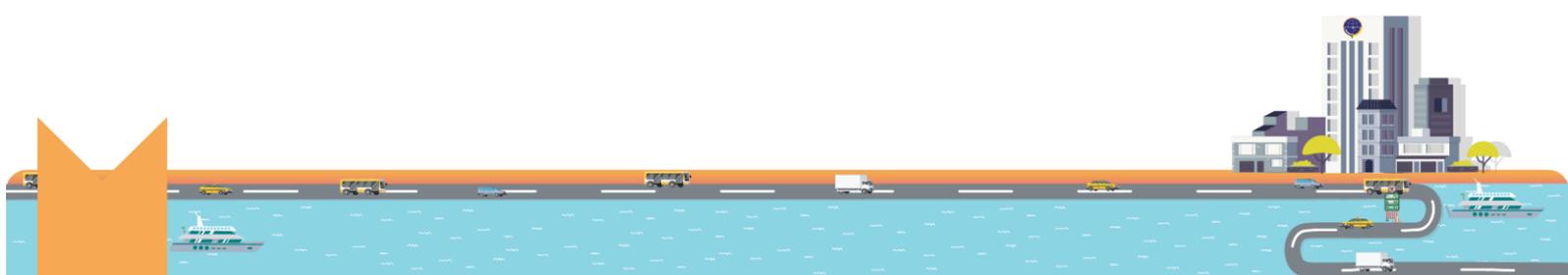
Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 71,83% dengan realisasi sebesar 72,05% menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,31% dengan realisasi sebanyak 275 SDM dari jumlah kebutuhan sebesar 564, dimana realisasi tersebut terdiri atas 131 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 144 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



III.3.2.7 Hambatan dan Kendala

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 masih mengalami hambatan kendala yang cukup signifikan. Adapun beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi saat ini ialah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan daya serap anggaran yang belum mencapai target pada beberapa kegiatan;
2. Sumber Daya Manusia yang kurang berkompeten pada suatu bidang sehingga diwajibkan untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidang dimaksud;
3. Faktor alam maupun cuaca dapat mempengaruhi tercapainya target capaian indikator kinerja kegiatan;
4. Kurangnya koordinasi secara intens antara tim atau atasan dapat menyebabkan kesalahpahaman target yang harus dicapai atau bagaimana cara mencapainya. Hal ini dapat menghambat kinerja dan mengakibatkan kegagalan mencapai target kinerja.





BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

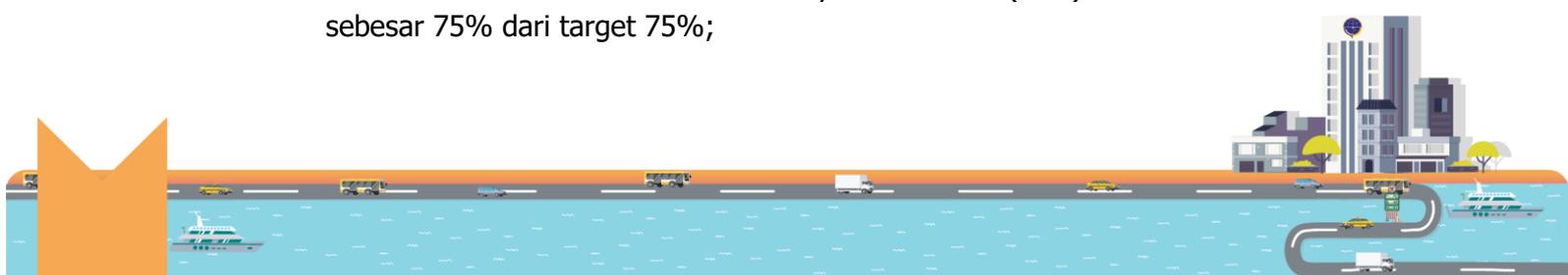
Sebagai Unit Pelayanan Teknis di bawah Ditjen Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dituntut untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perhubungan Darat secara proporsional dan kontinyu sesuai dengan Renstra periode 2020-2024. Adapun dalam penentuan Sasaran Kinerja dan Indikator Kegiatan, hendaknya selalu mengacu pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat dan menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang riil pada Provinsi Bali.

IV.2 Ringkasan Capaian

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan jalan terealisasi sebesar 100% dari target 100 %;
- b. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi sebanyak 1 dari target 1 lokasi;
- c. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebanyak 8 dari target 8 Lokasi;
- d. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A terealisasi sebesar 85% dari target 85%;
- e. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 75% dari target 75%;

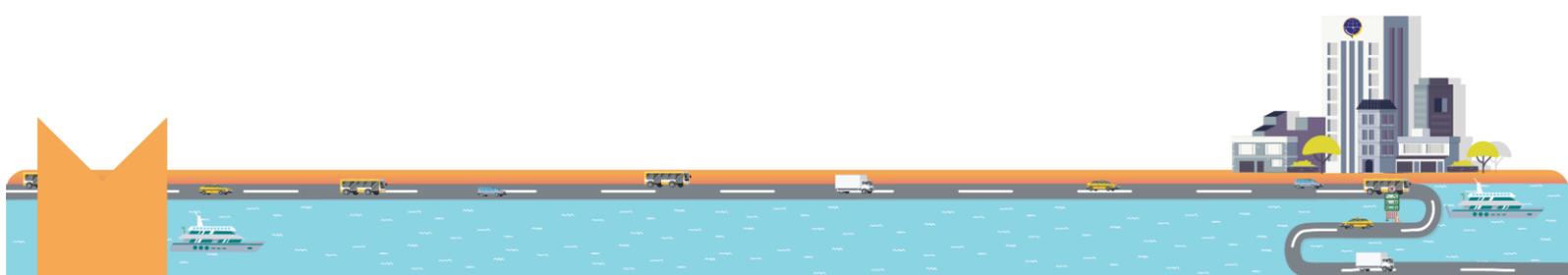




- f. Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal terealisasi sebesar 100% dari target 100 %;
 - g. Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 5% dari target 5 %;
 - h. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan terealisasi sebesar 8 lokasi dari target 8 lokasi;
 - i. Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebanyak 200 dari target 200 Orang;
 - j. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 85% dari target 85%;
 - k. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi nilai 100 dari target 100;
 - l. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi nilai 95 dari target 95.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima;
 3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

IV.3 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

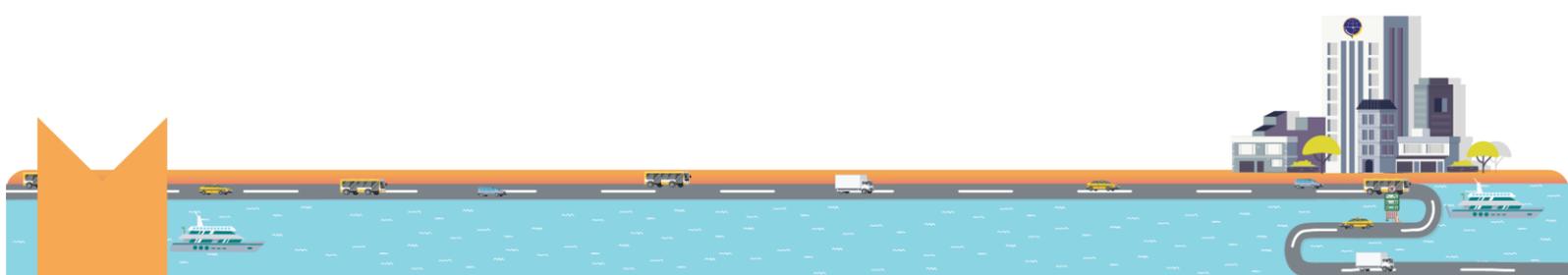


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Akan dilakukan monitoring dan pengawasan rutin terhadap kegiatan angkutan perintis ditiap bulannya .	Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan, Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 	Seksi Prasarana Jalan SDP
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8	8	8	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan. 	Seksi Prasarana Jalan SDP
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85	85	85	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui 	Seksi Prasarana Jalan SDP



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
									kegiatan pemilihan PO terbaik	
		IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75	75	85	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal dilapangan; Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jampelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Seksi Prasarana Jalan SDP
3	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan Yang telah terpasang 	Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5	5	5	100%	TERCAPAI	Mendorong upaya kesadaran para pengusaha Angkutan Barang untuk secara aktif mendukung terwujudnya penurunan jumlah angka pelanggaran pada UPPKB.	Seksi Prasarana Jalan SDP
		IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	8	8	8	100%	TERCAPAI	Peningkatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

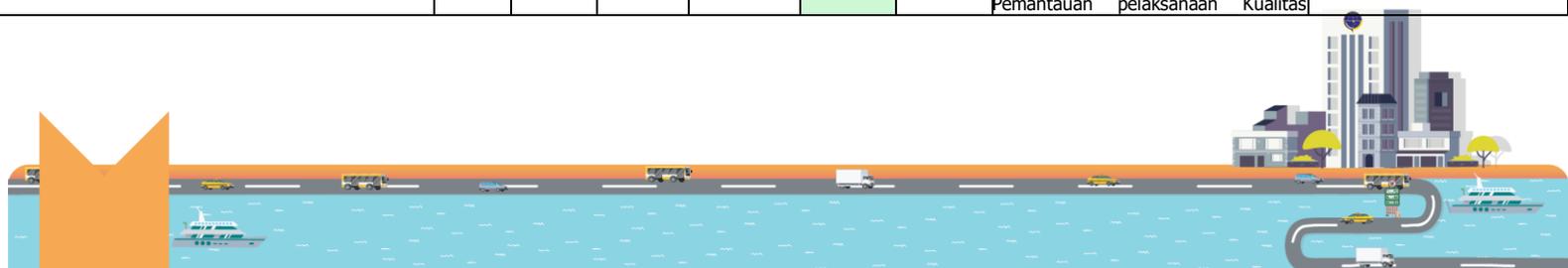
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	200	200	200	100%	TERCAPAI	Kegiatan Sosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Telah dilaksanakan Pada Triwulan ke II yaitu pada bulan Juni 2024	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
		IKK 3.7 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85	85	85	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh kab/kota di Provinsi Bali; memfasilitasi infrastruktur keselamatan diSDP; Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP. 	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	100	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat; Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat; Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Kualitas 	Sub Bagian Tata Usaha dan seluruh Seksi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

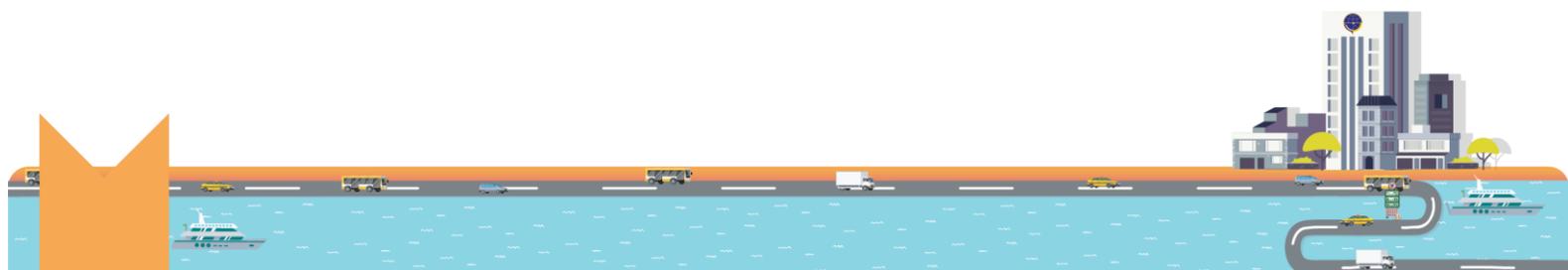
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95	95	95	100%	TERCAPAI	Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat. Manajemen terhadap SDM pegawai BPTD Kelas II Bali	Sub Bagian Tata Usaha





Daftar Lampiran



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Lampiran 13 :



Lampiran 14 :



Lampiran 15 :



Lampiran 16 :



Lampiran 17 :



Lampiran 18 :



Lampiran 19 :



Lampiran 20 :



Lampiran 21 :



Lampiran 22 :



Lampiran 23 :



Lampiran 24 :



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

